



Puri Kauhyan Ubud

ပုရီကော့ဟဲယုဒ်

www.purikauhanubud.org

Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana

PANCA KERTHA

Manifesto Pemikiran tentang Transformasi PHDI



Puri Kauhan Ubud

ပုရီကောဟန်အူဗုဒ္ဓ

www.purikauhanubud.org

Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana

PANCA KERTHA

Manifesto Pemikiran tentang Transformasi PHDI

Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana
PANCA KERTHA
Manifesto Pemikiran tentang Transformasi PHDI



Penulis

Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana

Cetakan Pertama, Agustus 2026
114 hal : 14,8 × 21 cm

Diterbitkan oleh :
Yayasan Puri Kauhan Ubud
Jl. Raya Ubud No.35, Ubud, Gianyar, Bali, Indonesia,
80571
www.purikauhanubud.org
email : info@purikauhanubud.org

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pasal 1 :

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana

Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf 1 untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan /atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah).



Sambrama Wacana

Om Swastyastu,

Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) lahir dari ikhtiar para pendahulu untuk membangun sebuah rumah bersama umat Hindu Indonesia.

Sejak pembentukannya pada 1959, Parisadha memikul tanggung jawab besar sebagai Majelis Keagamaan Tertinggi umat Hindu Indonesia: menuntun umat dalam menjalankan Dharma Agama dan Dharma Negara, menjaga persatuan, merawat kebhinnekaan tradisi Hindu Nusantara, sekaligus hadir menjawab persoalan-persoalan nyata yang dihadapi umat.

Namun, zaman terus berubah. Perubahan sosial berlangsung semakin cepat. Teknologi digital dan kecerdasan buatan mengubah cara manusia belajar, bekerja, berkomunikasi, bahkan memahami kehidupan keagamaannya.

Struktur demografi umat juga berubah dengan semakin besarnya peran generasi muda. Pada saat yang sama, umat Hindu menghadapi persoalan pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan hidup, kebudayaan, hingga tantangan mempertahankan identitas dan persatuan di tengah dunia yang semakin terbuka.

Dalam situasi seperti itu, kita perlu bertanya kembali: PHDI seperti apa yang dibutuhkan umat Hindu Indonesia hari ini dan di masa depan? Pertanyaan itulah yang menjadi titik berangkat buku kecil ini.

Buku Panca Kertha: Manifesto Pemikiran tentang Transformasi PHDI saya tulis menjelang Mahasabha XIII PHDI.

Bagi saya, Mahasabha tidak semestinya berhenti sebagai forum lima tahunan untuk memilih dan mengganti kepemimpinan.

Mahasabha harus menjadi momentum mulat sarira, ruang untuk melihat kembali perjalanan Parisadha sekaligus menentukan arah pembaruannya ke depan.

Karena itu, gagasan transformasi yang saya tawarkan tidak berangkat dari keinginan untuk meninggalkan sejarah PHDI. Justru sebaliknya: kita perlu kembali kepada jati diri untuk dapat melangkah lebih jauh ke masa depan.

Transformasi harus mampu mempertemukan keluhuran nilai-nilai ajaran Dharma dan tuntutan zaman; mempertemukan kewibawaan spiritual dengan manajemen modern; serta mempertemukan kekuatan tradisi dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan nyata umat.

Saya merangkum arah transformasi tersebut dalam Panca Kertha Transformasi PHDI: memulihkan marwah, menyatukan umat, merawat kebhinnekaan, membenahi tata kelola, dan memberdayakan umat.

Lima agenda itu saling berkaitan. Memulihkan marwah membutuhkan penataan kembali arsitektur kelembagaan PHDI

melalui penguatan *Sabha Pandita*, *Sabha Welaka*, dan Pengurus Harian sesuai *swadharma* masing-masing.

Menyatukan umat membutuhkan rekonsiliasi dan kemampuan mengelola perbedaan. Merawat kebhinnekaan berarti menjadikan PHDI benar-benar sebagai rumah bersama Hindu Nusantara, tempat beragam tradisi dan dresta memperoleh penghormatan dalam kesatuan Tattwa.

Membenahi tata kelola berarti membangun organisasi yang profesional, transparan, akuntabel, mandiri, dan tetap independen.

Sedangkan memberdayakan umat berarti memastikan kehadiran PHDI benar-benar dirasakan dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, penguatan generasi muda, serta perlindungan hak-hak umat.

Karena itu, transformasi PHDI pada akhirnya bukan terutama tentang struktur. Struktur hanyalah alat. Organisasi pun hanyalah sarana. Ukuran terpentingnya adalah seberapa besar nilai-nilai ajaran Dharma dapat dihadirkan dalam kehidupan nyata umat.

Saya membayangkan PHDI yang kuat otoritas keagamaannya, kokoh basis pengetahuannya, profesional tata kelolanya, mandiri pembiayaannya, luas jejaring kolaborasinya, serta nyata pelayanan dan pemberdayaannya.

Parisadha yang mampu mempertemukan kebijaksanaan para Wiku, kecendekiaan para *Wikan*, dan kerja nyata para *Sewaka* untuk kepentingan umat.

Lebih dari itu, PHDI harus mampu mempersiapkan masa depan. Angkatan muda Hindu bukan sekadar penerus umat pada suatu

hari nanti; mereka telah menjadi bagian penting dari wajah umat hari ini. Karena itu, mereka harus diberikan ruang untuk belajar, berkarya, berinovasi, mengabdikan, dan memimpin. Generasi Hindu masa depan harus berakar kuat pada Dharma dan kebudayaan Nusantara, tetapi sekaligus menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan AI, memiliki kemandirian ekonomi, kepedulian sosial-ekologis, serta kemampuan berkompetisi di dunia yang terus berubah.

Gagasan-gagasan dalam buku ini tentu bukan jawaban final. Saya menempatkannya sebagai undangan untuk berdialog. Transformasi PHDI tidak mungkin menjadi pekerjaan seorang ketua, sekelompok pengurus, ataupun satu generasi. Ia harus menjadi ikhtiar bersama para Pandita dan Pinandita, pengurus PHDI pusat dan daerah, intelektual, generasi muda, tokoh adat dan budaya, organisasi kemasyarakatan Hindu, dunia usaha, serta seluruh komponen umat.

Mahasabha XIII memberi kita sebuah kesempatan sejarah. Kesempatan untuk mengubah energi kontestasi menjadi energi transformasi; mengubah perbedaan menjadi kekuatan; serta mengubah kegelisahan terhadap keadaan menjadi kerja bersama membangun masa depan.

Karena itu, pesan utama buku ini sesungguhnya sederhana: Pulihkan Marwah. Satukan Umat. Rawat Kebhinnekaan. Benahi Tata Kelola. Berdayakan Umat.

Inilah Panca Kertha Transformasi PHDI. Semoga gagasan sederhana ini menjadi bagian dari punia pemikiran untuk membangun kembali kepercayaan umat terhadap rumah besarnya sendiri. Dan semoga Mahasabha XIII menjadi titik balik bagi lahirnya Parisadha yang semakin berwibawa dalam Dharma,

semakin profesional dalam tata kelola, semakin merangkul dalam kebhinnekaan, dan semakin nyata kehadirannya dalam kehidupan umat.

Pada akhirnya, seluruh ikhtiar transformasi itu bermuara pada tujuan yang sama: menghadirkan nilai-nilai ajaran Dharma dan juga nilai-nilai ajaran para leluhur untuk kemuliaan kehidupan, menjalankan Dharma Agama dan Dharma Negara dengan lascarya, serta bersama-sama mengantarkan umat menuju cita-cita luhur:

Moksartham Jagadhita Ya Ca Iti Dharma.

Om Santih, Santih, Santih Om.

Yogyakarta–Ubud, Agustus 2026
Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana

Daftar Isi

	SAMBRAMA WACANA	7
01	MAHASABHA XIII DAN TITIK BALIK TRANSFORMASI PHDI	17
	• Mengembalikan Marwah PHDI • Menyatukan Kembali Umat • Rumah Bersama Hindu Nusantara • Membenahi Tata Kelola dan Menjaga Independensi • Dari Pengayoman Menuju Pemberdayaan • Dari Kontestasi Menuju Transformasi	
02	MEMULIHKAN MARWAH PHDI: MENATA ARSITEKTUR DAN REVITALISASI TRI ANGGA	25
	• Mahasabha: Sumber Legitimasi Tri Angga • Sabha Pandita: Mengembalikan Wibawa Otoritas Para Wiku • Sabha Welaka: Memperkuat Tradisi Para Wikan • Pengurus Harian: Sewaka yang Melayani Umat • Membangun Siklus Tri Angga • PHDI sebagai Rumah Bersama	
03	METODOLOGI HINDU NUSANTARA SATUKAN UMAT, RAWAT KEBHINNEKAAN	33
	• Kearifan Para Lingsir: Mencari yang Menyatukan • Metodologi Hindu Nusantara: Bhinneka Tunggal Ika • Empat Strategi PHDI • PHDI sebagai Rumah Bersama	
04	MEMBANGUN KEMANDIRIAN PEMBIAYAAN PHDI: DARI KETERGANTUNGAN MENUJU PENDANAAN BERKELANJUTAN	43
	• Persoalan Struktural Pembiayaan PHDI • Kesimpulan	

05	PURA DAN DESA ADAT SEBAGAI BENTENG EKONOMI UMAT HINDU NUSANTARA	53
	• Pura sebagai Benteng Ekonomi Umat di Luar Bali • Membangun Ekonomi Sirkular Umat • Transformasi PHDI untuk Mewujudkan Jagadhita	
06	MENYIAPKAN ANGKATAN MUDA HINDU NUSANTARA	63
	• Enam Strategi Transformasi Memperkuat Anak Muda Hindu Nusantara • Menyiapkan Generasi, Menyiapkan Masa Depan	
07	MEMULIHKAN KEHORMATAN WIKU UNTUK KEJAYAAN HINDU NUSANTARA	71
	• Dari Surya Sewana menuju Loka Pala Sraya • Menghormati Kebhinnekaan Sistem Kepanditaan Hindu Nusantara • Memperkuat Pendidikan Calon Pandita • Meningkatkan Kualitas Diksa Pariksa • Menjaga Mutu Diksa dan Aguron-guron • Membangun Mekanisme Penjagaan Sesana yang Bermartabat • Memuliakan Wiku melalui Rsi Yadnya • Membangun Ruang Belajar Bersama Para Wiku • Memuliakan Wiku, Memperkuat Hindu Nusantara	

08 **MENATA KEMBALI KEPINANDITAAN: AGURON-GURON, SESANA, DAN PERLINDUNGAN PEMANGKU** **83**

- Memperjelas definisi dan kedudukan Pinandita
- Memperkuat kembali sistem Aguron-guron dan Kedewaguruan
- Menyusun pedoman materi Aguron-guron
- Mempertegas Sesana Kepamangkuan
- Menjaga kesejahteraan para Pemangku
- Membangun sistem pembinaan, pengawasan, dansanksi

09 **REFOCUSING SISTEM PENDIDIKAN HINDU NUSANTARA: PILAR UTAMA WUJUDKAN SDM UNGGUL** **93**

- Memperluas Akses dan Meningkatkan Kualitas Pendidikan
- Memperkuat Tata Kelola Lembaga Pendidikan Hindu
- Memperjuangkan Ketersediaan Guru dan Penyuluh Agama Hindu
- Memperkuat Perguruan Tinggi Hindu di Luar Bali
- Mengembangkan Widyalya sebagai Basis Pendidikan Hindu
- Membangun Ekosistem Pendidikan Hindu yang Terintegrasi
- Membangun Kolaborasi Riset Hindu Nusantara
- Mengintegrasikan Pendidikan dengan Pemberdayaan Umat
- Dari Widya Menuju Umat Berdaya

10 **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN: SAYAP TANGGUH HINDU NUSANTARA** **103**

- Kesetaraan Kesempatan: Pendidikan dan Kesehatan
- Memperkuat WHDI sebagai Pilar Pemberdayaan
- Membangun Perempuan Hindu yang Tangguh
- Perempuan sebagai Penjaga Kebudayaan Nusantara
- Dua Sayap, Satu Kepakan

TENTANG PENULIS **110**

99

Mahasabha XIII harus menjadi momentum mulat sarira dan titik balik transformasi PHDI. Momentum untuk memulihkan marwah PHDI untuk merawat persatuan tanpa menghapus kebhinnekaan, dan menjadikannya rumah bersama seluruh umat Hindu Nusantara.

01

MAHASABHA XIII DAN TITIK BALIK TRANSFORMASI PHDI

MAHASABHA XIII DAN TITIK BALIK TRANSFORMASI PHDI

Mahasabha XIII Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) 2026 tidak semestinya berhenti sebagai forum lima tahunan untuk memilih dan mengganti kepengurusan. Di tengah perubahan sosial yang cepat, dinamika internal umat, dan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi umat Hindu Indonesia, Mahasabha harus menjadi momentum mulat sarira sekaligus titik balik transformasi kelembagaan PHDI.

Pertanyaan mendasarnya bukan sekadar siapa yang akan memimpin PHDI, melainkan PHDI seperti apa yang dibutuhkan umat Hindu Indonesia hari ini dan di masa depan?

Pertanyaan tersebut penting karena sejak pembentukannya pada 1959, Parisadha memiliki kedudukan historis sebagai Majelis Keagamaan Tertinggi umat Hindu Indonesia. Namun, sebuah lembaga keagamaan tidak dapat hidup hanya dari kebesaran sejarah. Ia harus terus memperbarui dirinya tanpa kehilangan jati dirinya.

Karena itu, Mahasabha XIII perlu melahirkan agenda transformasi: memulihkan marwah, menyatukan umat, merawat kebhinnekaan, membenahi tata kelola, dan memberdayakan umat. Lima agenda tersebut saya sebut sebagai Panca Kertha Transformasi PHDI.

Mengembalikan Marwah PHDI

Agenda pertama adalah mengembalikan marwah PHDI melalui restorasi arsitektur kelembagaan. Kedudukan dan fungsi *Sabha Pandita*, *Sabha Welaka*, dan Pengurus Harian perlu diperkuat kembali sebagai unsur kelembagaan yang saling menopang.

Sabha Pandita harus semakin kokoh sebagai Lembaga Brahmanasista, sumber tuntunan keagamaan tertinggi melalui *Bhisama* dan *Dharma Panuntun*. Sabha Welaka diperkuat sebagai ruang pemikiran, kajian, dan pertimbangan intelektual melalui *Dharma Tatimbang*. Sementara Pengurus Harian menerjemahkan tuntunan tersebut dalam kebijakan, program, dan pelayanan umat secara profesional.

Di sinilah marwah spiritual dan manajemen modern harus dipertemukan. Otoritas spiritual memberikan arah *Dharma Agama* dan *Dharma Negara*, sementara tata kelola modern memastikan keputusan dan program dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan efektif.

Mengembalikan marwah PHDI, dengan demikian, bukanlah membawa organisasi mundur ke masa lalu. Kita kembali kepada jati diri untuk melangkah lebih jauh ke masa depan.

Menyatukan Kembali Umat

Agenda kedua adalah rekonsiliasi dan penguatan persatuan umat. Tidak ada organisasi keagamaan yang kuat apabila energinya habis dalam konflik internal. Mahasabha XIII harus menjadi ruang rekonsiliasi berdasarkan keadaban, etika, dan konstitusi organisasi.

Rekonsiliasi bukan berarti meniadakan perbedaan. Perbedaan pandangan merupakan sesuatu yang wajar. Yang diperlukan adalah kemampuan mengelola perbedaan tanpa mengubahnya menjadi fragmentasi dan permusuhan.

PHDI juga perlu membangun komunikasi yang lebih sehat antara pusat dan daerah serta memperluas jejaring kolaborasi dengan pemerintah, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan Hindu, komunitas kebudayaan, wirausaha dan pengusaha Hindu, serta berbagai elemen masyarakat.

Kekuatan PHDI masa depan bukan hanya ditentukan oleh struktur organisasinya, tetapi juga oleh kemampuan membangun jejaring, kepercayaan, dan kolaborasi.

Rumah Bersama Hindu Nusantara

Agenda ketiga adalah meneguhkan PHDI sebagai rumah bersama Hindu Nusantara. Hindu Indonesia tumbuh dalam keragaman tradisi, dresta, tata titi upacara-upakara, komunitas, dan ekspresi budaya. Kebhinnekaan tersebut tidak boleh dipandang sebagai sumber fragmentasi, melainkan sebagai kekayaan peradaban Hindu Nusantara.

Semangat "*Eka Twa, Aneka Twa, Swalaksana Bhatara*" mengingatkan bahwa kesatuan tidak identik dengan keseragaman: satu dalam hakikat, beragam dalam ekspresi dan jalan pengabdian.

Karena itu, PHDI harus menjadi rumah yang cukup besar bagi seluruh keberagaman tersebut. Tidak boleh ada kelompok umat yang merasa menjadi tamu di rumahnya sendiri, atau tradisi dan dresta yang merasa ditempatkan lebih rendah daripada yang lain.

Parisadha harus merangkul kebhinnekaan itu dalam satu persaudaraan Dharma Agama: berakar pada tradisi, terbuka terhadap keberagaman, dan teguh dalam persatuan umat Hindu Nusantara.

Membenahi Tata Kelola dan Menjaga Independensi

Agenda keempat adalah reformasi tata kelola. Rekrutmen kepengurusan harus berbasis integritas, kompetensi, rekam jejak, dan semangat ngayah. Program kerja harus terintegrasi, realistis, terukur, dan dapat dilaksanakan. Pembiayaan organisasi perlu dibangun secara sehat dan berkelanjutan, sementara administrasi kelembagaan perlu dimodernisasi melalui inovasi digital.

Namun, reformasi tata kelola tidak akan berarti tanpa independensi. Sebagai majelis keagamaan, PHDI harus menjaga jarak yang sehat dari kepentingan politik praktis, kelompok dan golongan, maupun ambisi pribadi.

Kita dapat meminjam spirit pesan K.H. Ahmad Dahlan kepada Persyarikatan Muhammadiyah dan menerjemahkannya dalam konteks Parisadha: "Hidup-hidupkanlah PHDI, jangan mencari hidup di PHDI."

Jabatan di PHDI adalah ruang pengabdian, bukan batu loncatan untuk mengejar kekuasaan politik, jabatan publik, posisi komisaris, ataupun keuntungan ekonomi. PHDI akan memiliki kewibawaan apabila orang datang untuk ngayah, bukan mencari posisi.

Dari Pengayoman Menuju Pemberdayaan

Agenda kelima sekaligus menjadi muara transformasi: menggeser paradigma dari sekadar pengayoman menuju pemberdayaan umat.

Pertanyaan paling penting dari setiap reformasi organisasi adalah sederhana: apa yang berubah dalam kehidupan umat? PHDI harus semakin nyata memperjuangkan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, pemberdayaan ekonomi melalui UMKM, kewirausahaan dan koperasi, penguatan generasi muda, serta peningkatan *Sraddha* melalui metode yang relevan dengan perkembangan zaman.

Pada saat yang sama, PHDI harus menjaga, memuliakan, melestarikan, dan memajukan seni, tradisi, *dresta*, serta kebudayaan Hindu Nusantara. *Parisadha* juga harus semakin kuat dalam advokasi dan perlindungan hak-hak umat Hindu di seluruh Indonesia.

Dengan demikian, kehadiran PHDI tidak hanya dirasakan ketika muncul persoalan organisasi atau keagamaan, tetapi hadir dalam kehidupan sehari-hari umat.

Dari Kontestasi Menuju Transformasi

Reformasi kelembagaan bukan tujuan akhir. Organisasi hanyalah sarana. Muara seluruh transformasi adalah semakin kuatnya kemampuan PHDI untuk menuntun, melayani, melindungi, dan

memberdayakan umat dalam menjalankan *Dharma Agama* dan *Dharma Negara*.

Karena itu, *Mahasabha XIII* tidak boleh terjebak menjadi arena kontestasi elite tentang siapa mendapatkan posisi apa. Jika *Mahasabha* hanya menghasilkan pergantian nama dan susunan kepengurusan, sementara cara berpikir, cara bekerja, dan orientasi organisasi tidak berubah, kita akan kehilangan momentum sejarah.

Yang dibutuhkan bukan hanya pergantian orang, tetapi pembaruan cara berpikir, cara bekerja, dan cara PHDI hadir di tengah kehidupan umat.

Para Pandita dan Pinandita, pengurus PHDI pusat dan daerah, intelektual, generasi muda, tokoh adat dan budaya, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, serta seluruh komponen umat perlu menjadikan *Mahasabha XIII* sebagai momentum mulat sarira bersama.

Sudah waktunya energi perpecahan diubah menjadi energi transformasi. Pulihkan marwah. Satukan umat. Rawat kebhinnekaan. Benahi tata kelola. Berdayakan umat. Inilah *Panca Kertha Transformasi PHDI*. Bukan semata agenda organisasi, melainkan ikhtiar membangun kembali kepercayaan umat terhadap rumah besarnya sendiri.

Mahasabha XIII harus menjadi titik balik untuk mengembalikan PHDI kepada tujuan mulianya: menjalankan *Dharma Agama* dan *Dharma Negara* secara *lascarya* serta menghadirkan *Dharma* dalam kehidupan nyata umat dan bangsa. Dengan jalan itulah PHDI dapat semakin kokoh menjadi rumah bersama umat Hindu Nusantara, menuju cita-cita luhur: *Moksartham Jagadhita Ya Ca Iti Dharma*.

99

PHDI harus menjadi Majelis Keagamaan Tertinggi yang berwibawa dalam nilai-nilai Dharma, kuat dalam pengetahuan, profesional dalam tata kelola, dan nyata dalam pelayanan umat.

02

**MEMULIHKAN
MARWAH PHDI:
MENATA ARSITEKTUR
DAN REVITALISASI TRI
ANGGA**

MEMULIHKAN MARWAH PHDI: MENATA ARSITEKTUR DAN REVITALISASI TRI ANGGA

Menjelang Mahasabha XIII Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI), perbincangan mengenai masa depan PHDI seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan tentang siapa yang akan memimpin lima tahun ke depan. Ada pertanyaan yang lebih mendasar: PHDI seperti apa yang dibutuhkan umat Hindu Indonesia hari ini dan di masa depan?

Pertanyaan ini penting karena PHDI bukan sekadar organisasi kemasyarakatan biasa. Parisadha harus diteguhkan kembali jati dirinya sebagai Majelis Keagamaan Tertinggi Umat Hindu Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai ajaran Dharma, berakar pada sastra agama dan dresta, serta mampu menaungi kebhinnekaan tradisi Hindu Nusantara.

Karena itu, Mahasabha XIII perlu menjadi momentum untuk melakukan penataan kembali kelembagaan PHDI. Salah satu gagasan yang saya tawarkan adalah Revitalisasi Arsitektur Tri Angga PHDI: **Sabha Pandita** sebagai Majelis Para Wiku, **Sabha Welaka** sebagai Majelis Para Wikan, dan **Pengurus Harian** sebagai organ pelaksana atau majelis Para Sevanam/Sewaka.

Ketiganya bukan tiga pusat kekuasaan yang saling bersaing, melainkan tiga swadharma dalam satu kesatuan Parisadha: **tuntunan – kajian – pelaksanaan**. Dengan arsitektur tersebut, PHDI diharapkan memiliki otoritas keagamaan yang kuat, basis pengetahuan yang kokoh, tata kelola profesional, sekaligus memberikan pelayanan kepada umat yang nyata.

Mahasabha: Sumber Legitimasi Tri Angga

Dalam Arsitektur Tri Angga, Mahasabha tetap merupakan forum permusyawaratan tertinggi PHDI dan sumber legitimasi kelembagaan. Mahasabha menetapkan AD/ART, arah besar dan kebijakan strategis, memilih kepemimpinan, mengevaluasi pertanggungjawaban kelembagaan, serta menetapkan keputusan fundamental mengenai masa depan PHDI.

Namun, harus dibedakan antara forum permusyawaratan tertinggi dengan otoritas keagamaan tertinggi. Mahasabha merupakan forum permusyawaratan tertinggi, sedangkan di antara dua Mahasabha, Sabha Pandita merupakan pimpinan dan pemegang otoritas keagamaan tertinggi PHDI.

Pembedaan ini penting. PHDI harus demokratis dalam memperoleh mandat organisasi, tetapi otoritas Dharma tidak boleh semata-mata menjadi produk kontestasi politik organisasi.

Sabha Pandita: Mengembalikan Wibawa Otoritas Para Wiku

Angga pertama adalah *Sabha Pandita*, Majelis Wiku yang menjadi penjaga marwah dan otoritas Dharma PHDI. *Sabha Pandita* terdiri atas 33 *Wiku* senior yang dipilih dan ditetapkan dalam Mahasabha. Mereka harus memenuhi persyaratan pengalaman kewikuan, pemahaman sastra agama, integritas, keteladanan, kematangan spiritual, komitmen terhadap persatuan umat, serta secara keseluruhan mencerminkan kebhinnekaan Hindu Nusantara. *Sabha Pandita* dipimpin seorang *Dharma Adyaksa* yang dipilih dari dan oleh anggota *Sabha Pandita*.

Revitalisasi *Sabha Pandita* menjadi penting karena sebuah Majelis Keagamaan Tertinggi harus memiliki sumber otoritas keagamaan yang jelas. *Sabha Pandita* menetapkan Bhisama, mengeluarkan *Dharma Panuntun*, dan memberikan kesatuan tafsir atas persoalan *Tattwa*, *Susila*, serta Upacara/*Panca Yadnya*.

Namun, kesatuan tafsir tidak boleh berarti penyeragaman tradisi. Ajaran Hindu harus tetap ajeg berdasarkan sastra agama dengan menghormati Catur Dresta dan kebhinnekaan Hindu Nusantara.

Dengan demikian, yang kita bangun adalah kesatuan tuntunan Dharma dalam kebhinnekaan dresta.

Sabha Welaka: Memperkuat Tradisi Para Wikan

Angga kedua adalah *Sabha Welaka* sebagai Majelis Para Wikan. Di dalamnya berhimpun intelektual Hindu yang memahami sastra agama dan/atau memiliki keahlian dalam berbagai bidang ilmu

pengetahuan yang relevan dengan kehidupan umat. Sabha Welaka menjadi jembatan antara sastra, ilmu pengetahuan, perubahan sosial, dan kebijakan organisasi.

Peran ini semakin penting karena persoalan umat Hindu tidak hanya berkaitan dengan ritual dan upacara. Umat menghadapi persoalan pendidikan, ekonomi, kesehatan, kebudayaan, lingkungan hidup, teknologi, hukum, perubahan sosial, serta berbagai persoalan kebangsaan.

Karena itu, Sabha Welaka perlu menjadi dapur pemikiran PHDI: melakukan kajian strategis, membaca perkembangan kehidupan umat, memberikan pertimbangan kepada Pengurus Harian, serta menyiapkan bahan kajian bagi Sabha Pandita dalam merumuskan Bhisama dan Dharma Panuntun.

Dengan demikian, PHDI dapat menghidupkan tradisi intelektual yang menghubungkan Sastra – Dresta – Ilmu Pengetahuan – Realitas Kehidupan Umat.

Pengurus Harian: Sewaka yang Melayani Umat

Angga ketiga adalah Pengurus Harian sebagai organ pelaksana. Namun menjadi pengurus PHDI seharusnya tidak dimaknai sebagai sekadar menduduki jabatan organisasi. Mereka adalah sevanan atau sewaka, orang-orang yang menjalankan seva atau pelayanan kepada umat.

Pengurus Harian menerjemahkan keputusan Mahasabha, *Bhisama*, *Dharma Panuntun*, dan arahan *Sabha Pandita* menjadi program serta pelayanan nyata. Fungsi utamanya mencakup pelayanan dan pemberdayaan umat di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial, kebudayaan, kepemudaan, serta bidang lain yang menentukan kualitas kehidupan umat Hindu.

Karena itu, ukuran keberhasilan Pengurus Harian bukan banyaknya struktur, rapat, atau seremoni organisasi. Ukurannya adalah seberapa nyata kehadiran PHDI dirasakan oleh umat.

Ketika umat menghadapi persoalan, PHDI harus hadir sebagai problem solver. Ketika umat membutuhkan peningkatan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi, PHDI harus hadir. Ketika tradisi, dresta, seni, dan kebudayaan Hindu Nusantara membutuhkan penguatan, PHDI juga harus hadir.

Membangun Siklus Tri Angga

Hubungan Tri Angga tidak cukup digambarkan sebagai struktur vertikal. Ia harus menjadi siklus Dharma yang menghubungkan persoalan nyata umat dengan pengetahuan dan tuntunan keagamaan:

Persoalan Umat → Pengurus Harian → Kajian Sabha Welaka → Tuntunan Sabha Pandita → Pelaksanaan Pengurus Harian → Evaluasi.

Dengan mekanisme ini, keputusan PHDI tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan administratif, tetapi lahir dari hubungan antara realitas umat, kajian pengetahuan, dan tuntunan Dharma

Untuk menyatukan ketiga Angga, diperlukan Pesamuan Agung sebagai forum koordinasi tahunan Sabha Pandita, Sabha Welaka, dan Pengurus Harian. Pesamuan Agung mengevaluasi pelaksanaan keputusan Mahasabha, Bhisama dan Dharma Panuntun, menyelaraskan agenda, serta merumuskan respons bersama terhadap persoalan strategis umat Hindu Nusantara.

Sementara itu, masing-masing unsur memiliki ruang konsolidasi melalui Pesamuan Sabha Pandita, Pesamuan Sabha Welaka, dan Pesamuan Pengurus Harian.

Dengan demikian, tata kelolanya menjadi jelas: Mahasabha memberi mandat, Pesamuan Agung mengintegrasikan, Pesamuan mengonsolidasikan, Sabha Pandita menuntun, Sabha Welaka mengkaji, dan Pengurus Harian melaksanakan serta melayani.

PHDI sebagai Rumah Bersama

Pada akhirnya, transformasi kelembagaan PHDI bukan sekadar soal mengubah struktur. Yang jauh lebih penting adalah mengembalikan jati diri dan marwah Parisadha.

PHDI harus menjadi Majelis Keagamaan Tertinggi yang berwibawa dalam nilai-nilai Dharma, kuat dalam pengetahuan, profesional dalam tata kelola, dan nyata dalam pelayanan umat.

Kita tidak membutuhkan PHDI yang besar struktur organisasinya tetapi lemah otoritas keagamaannya. Sebaliknya, kita juga tidak membutuhkan PHDI yang hanya berbicara tentang Dharma Agama tetapi jauh dari persoalan nyata umat. Yang kita perlukan adalah Parisadha yang mampu mempertemukan keluhuran sastra, kebijaksanaan para Wiku, kecendekiaan para Wikan, dan kerja nyata para Sewaka

Mahasabha XIII harus menjadi momentum mulat sarira dan titik balik transformasi PHDI. Dari sanalah marwah PHDI dipulihkan, persatuan dirawat tanpa menghapus kebhinnekaan, dan Parisadha kembali menjadi rumah bersama seluruh umat Hindu Nusantara.

99

Kita membutuhkan PHDI yang mampu mempertemukan keluhuran sastra, kebijaksanaan para Wiku, kecendekiaan para Wikan, dan kerja nyata para Sewaka.

03

**METODOLOGI
HINDU NUSANTARA
SATUKAN UMAT,
RAWAT KEBHINNEKAAN**

METODOLOGI HINDU NUSANTARA SATUKAN UMAT, RAWAT KEBHINNEKAAN

Hindu di Nusantara memiliki watak yang khas. Ia tumbuh dan berkembang di sebuah negeri kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau, dipisahkan sekaligus dihubungkan oleh laut dan selat. Kondisi geografis, perjalanan sejarah, dan perjumpaan dengan kebudayaan setempat melahirkan wajah Hindu yang beragam: berbeda bahasa, tradisi, adat, dresta, maupun ekspresi keagamaannya.

Karena itu, Hindu Nusantara tidak pernah hadir dalam satu wajah yang seragam. Hindu di Bali memiliki ekspresi yang berbeda dengan Hindu di Jawa, Tengger, Lombok, Kaharingan (Kalimantan), Tolotang dan Alukta (Sulawesi), Sumatra, Maluku, dan berbagai wilayah Nusantara lainnya. Bahkan dalam satu daerah pun terdapat keragaman *desa, kala, patra* dan *desa mawa cara*.

Namun, keragaman bukan berarti tidak ada yang menyatukan. Di balik berbagai ekspresi itu terdapat saripati nilai-nilai ajaran Dharma yang sama. Ibarat buah, lapisan kulit luarnya dapat berbeda warna dan bentuk. Ketika dikupas semakin dalam, kita akan menemukan sari yang sama. Demikian pula kehidupan beragama Hindu. Pada lapisan yang paling terlihat, terutama dalam acara dan upacara, keragamannya sangat kaya. Tetapi ketika ditelusuri sampai pada lapisan terdalam, kita menemukan kesatuan tattwa. Inilah cara pandang yang penting untuk memahami Hindu Nusantara: beragam dalam ekspresi, tetapi bertemu dalam esensi Dharma.

Kearifan Para Lingsir: Mencari yang Menyatukan

Para lingsir pendiri Parisadha telah menunjukkan kebijaksanaan besar dalam membaca kenyataan tersebut. Salah satu keputusan penting adalah bergerak dari penyebutan “Hindu Bali” menuju “Hindu Dharma”. Perubahan ini bukan sekadar pergantian istilah. Kata Dharma menunjukkan upaya menemukan esensi ajaran yang dapat menjadi rumah bersama bagi umat Hindu dengan latar kebudayaan yang berbeda-beda.

Dari proses sejarah itulah kemudian dibangun semacam konsensus dasar untuk membingkai Hindu Nusantara. **Pertama**, Tiga Kerangka Dasar Agama Hindu: Tattwa, Susila, dan Acara. Tattwa merupakan landasan filosofis dan teologis yang kemudian diwujudkan dalam etika kehidupan serta beragam bentuk acara keagamaan. Kerangka

ini memungkinkan kita memahami mengapa kesatuan ajaran tidak harus selalu melahirkan keseragaman ekspresi.

Kedua, Panca Sradha, yakni keyakinan terhadap Brahman, Atman, Karmaphala, Punarbhawa, dan Moksa. Panca Sradha menjadi fondasi keyakinan yang menyatukan umat Hindu di tengah perbedaan tradisi dan kebudayaan.

Ketiga, Panca Yadnya, sebagai kerangka pengorbanan suci dan pelaksanaan kewajiban manusia yang berkaitan erat dengan kesadaran terhadap Tri Rna. Melalui yadnya, hubungan manusia dengan Hyang Widhi, leluhur, sesama manusia, para rsi, serta alam semesta ditempatkan dalam hubungan yang harmonis.

Keempat, Tri Sandhya dan Panca Sembah sebagai tuntunan persembahyangan yang memberikan ruang bersama bagi umat Hindu dari berbagai latar tradisi.

Empat hal tersebut menjadi titik temu. Sementara berbagai persoalan lain yang lahir dari keragaman tradisi, dresta, dan praktik keagamaan tidak harus diseragamkan, melainkan terus didialogkan melalui proses kesatuan tafsir.

Dengan demikian, Hindu Nusantara sesungguhnya merupakan hasil dari kebijaksanaan para leluhur dalam mengelola keragaman. Mereka tidak menghapus perbedaan. Sebaliknya, mereka mengakui dan merawat perbedaan sambil terus menggali sari-sari ajaran yang dapat menjadi konsensus bersama.

Metodologi Hindu Nusantara: Bhinneka Tunggal Ika

Cara pandang tersebut sesungguhnya sejalan dengan kebijaksanaan Nusantara yang telah berusia berabad-abad:

Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Mangrawa. Dalam keragaman selalu terdapat yang menyatukan. Sebaliknya, kesatuan tidak pernah menuntut hilangnya keragaman. Karena itu, membangun Hindu Nusantara membutuhkan keseimbangan antara *Aneka Twa* dan *Eka Twa*. Kita harus menghindari dua tarikan ekstrem.

Ekstrem pertama adalah terlalu menekankan *Tunggal Ika/ Eka Twa* sehingga kesatuan diterjemahkan menjadi penyeragaman. Semua praktik keagamaan ingin dibuat sama, seolah-olah hanya ada satu cara yang benar dalam menjalankan Agama. Cara pandang seperti ini berpotensi meminggirkan dresta, tradisi, dan warisan luhur komunitas Hindu Nusantara.

Ekstrem kedua adalah terlalu menekankan *kebhinnekaan/ Aneka Twa*. Kearifan lokal ditempatkan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri tanpa upaya menemukan hubungan dengan prinsip-prinsip ajaran Dharma yang lebih mendasar. Jika ini terjadi, kita akan memiliki banyak ekspresi keagamaan tetapi kehilangan ruang bersama yang menyatukan.

Maka tantangannya bukan memilih antara kesatuan atau keragaman. Tantangannya adalah merawat keduanya secara bersamaan. Pandangan ini mengatasi dualitas yang berarti mengubah cara pandang dari pertentangan kaku (*oposisi biner*) menjadi hubungan timbal balik yang dinamis (*dialektika*). Keragaman dan kesatuan bukanlah dua hal yang saling meniadakan, melainkan dua sisi yang saling menghidupkan, di mana kesatuan justru kokoh karena ada keragaman yang merawatnya. Saling menghidupkan: Kesatuan tidak akan bermakna tanpa keragaman; keragaman akan tercerai-berai tanpa orientasi kesatuan. Dialektika ini juga menimbulkan tegangan kreatif: Perbedaan diposisikan sebagai energi dialog yang terus menerus menyempurnakan bentuk bersama. Dialektika menghasilkan sintesis yang berkembang: Setiap pertemuan antara

unsur yang berbeda melahirkan bentuk keharmonisan baru yang lebih kaya dari sebelumnya

Empat Strategi PHDI

Sebagai Majelis Keagamaan Tertinggi umat Hindu Indonesia, PHDI memiliki tanggung jawab besar menjaga keseimbangan antara *Aneka Twa* dan *Aneka Twa* tersebut. Setidaknya terdapat empat strategi yang perlu dilakukan.

Pertama, melindungi ruang kebhinnekaan Hindu Nusantara. PHDI harus menjadi pengayom bagi komunitas-komunitas Hindu agar mereka memiliki ruang yang aman untuk menjaga dan mengembangkan tradisi serta dresta masing-masing. Prinsip *desa mawa cara* harus dihormati. Namun, penghormatan terhadap dresta perlu disertai proses penggalian yang lebih mendalam. Setiap komunitas didorong untuk mengidentifikasi tattwa, nilai, dan saripati ajaran agama Hindu yang hidup di balik tradisinya. Dengan demikian, tradisi tidak hanya diwariskan sebagai kebiasaan, tetapi dipahami landasan ajarannya.

Kedua, membangun komunikasi yang intensif dengan PHDI Daerah dan komunitas umat Hindu. PHDI Pusat tidak boleh hadir hanya ketika terjadi persoalan atau menjelang kegiatan organisasi. Kehadirannya harus dirasakan secara terus-menerus oleh umat di berbagai daerah.

Dialog dengan PHDI Provinsi, Kabupaten/Kota, para sulinggih dan pinandita, lembaga keagamaan, akademisi, serta komunitas Hindu Nusantara harus menjadi bagian dari tata kelola organisasi. Melalui komunikasi tersebut, PHDI dapat memahami keragaman dari dekat sekaligus memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap tradisi lokal.

Ketiga, membangun kesatuan tafsir melalui Sabha Pandita dan Sabha Welaka. Keragaman tidak cukup hanya dirayakan. Pada persoalan tertentu tetap diperlukan tuntunan yang memberikan arah bersama. Sabha Pandita bersama Sabha Welaka perlu terus menggali, mendialogkan, dan merumuskan kesatuan tafsir terhadap berbagai persoalan keagamaan. Namun titik tekannya harus pada kesatuan Tattwa, bukan penyeragaman tata cara.

Hasil proses tersebut perlu dituangkan secara sistematis dalam Upadesa Hindu Nusantara yang dapat menjadi sumber pendidikan dan tuntunan bagi umat. Dengan demikian, PHDI tidak menjadi lembaga yang sibuk menentukan seragam-tidaknya upacara, tetapi menjadi majelis yang menerangi umat dengan Dharma Panuntun.

Keempat, membangun metodologi pendidikan Hindu Nusantara. PHDI perlu bersinergi dengan Kementerian Agama, khususnya Ditjen Bimas Hindu, perguruan tinggi keagamaan Hindu, para penyuluh, dan guru agama Hindu untuk mengembangkan metodologi pendidikan Hindu Nusantara.

Guru dan penyuluh perlu memiliki perspektif yang mampu menjelaskan bahwa keragaman tradisi Hindu bukan penyimpangan, melainkan kenyataan historis yang harus dipahami melalui kerangka Tattwa, Susila, dan Acara. Pendidikan agama harus mampu mengajarkan keyakinan yang kokoh sekaligus penghormatan terhadap keragaman.

Dengan cara itu, generasi muda Hindu tidak tumbuh dengan pandangan bahwa menjadi Hindu berarti harus menjadi sama. Mereka justru memahami bahwa kesatuan nilai-nilai ajaran Dharma dapat hidup melalui beragam bahasa budaya.

PHDI sebagai Rumah Bersama

Pada akhirnya, masa depan Hindu Nusantara sangat bergantung pada kemampuan kita mengelola hubungan antara kesatuan dan keragaman. PHDI harus berdiri di tengah: tidak menjadi kekuatan penyeragaman, tetapi juga tidak membiarkan umat berjalan sendiri-sendiri tanpa titik temu. PHDI harus menjadi rumah bersama tempat berbagai tradisi Hindu Nusantara memperoleh perlindungan sekaligus menemukan kesatuan dalam Tattwa. Di sinilah kebijaksanaan Bhinneka Tunggal Ika memperoleh maknanya yang paling hidup. Yang disatukan bukan bentuk luarnya, tetapi Tattwa-nya. Yang dirawat bukan perbedaannya semata, tetapi nilai-nilai ajaran Dharma yang hidup di dalam keragaman itu. Dengan jalan inilah Hindu Nusantara dapat tetap berakar kuat pada tradisi masing-masing, tetapi sekaligus tumbuh sebagai satu keluarga besar umat Hindu Indonesia

99

Para lingsir pendiri Parisadha telah menunjukkan kebijaksanaan dengan mengubah penyebutan “Hindu Bali” menuju “Hindu Dharma”. Perubahan ini bukan sekadar pergantian istilah.

Kata Dharma menunjukkan upaya menemukan esensi ajaran yang dapat menjadi rumah bersama bagi umat Hindu dengan latar kebudayaan yang berbeda-beda.

04

**MEMBANGUN
KEMANDIRIAN
PEMBIAYAAN PHDI:
DARI KETERGANTUNGAN
MENUJU PENDANAAN
BERKELANJUTAN**

MEMBANGUN KEMANDIRIAN PEMBIAYAAN PHDI: DARI KETERGANTUNGAN MENUJU PENDANAAN BERKELANJUTAN

Transformasi kelembagaan Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) tidak cukup hanya berbicara mengenai struktur organisasi, program kerja, sumber daya manusia, ataupun transformasi digital. Ada satu persoalan mendasar yang menentukan apakah seluruh agenda tersebut dapat dijalankan atau hanya berhenti sebagai gagasan: pembiayaan organisasi.

Pembiayaan adalah darah yang mengalir dalam tubuh organisasi. Program yang baik membutuhkan pembiayaan. Pelayanan kepada umat membutuhkan pembiayaan. Demikian pula sekretariat, administrasi, komunikasi publik, persidangan organisasi, penyusunan kajian dan Bhisama, pengembangan sumber daya manusia, hingga kehadiran PHDI dalam berbagai persoalan umat membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai.

Tanpa aliran dana yang lancar dan berkelanjutan, organisasi akan kehilangan kemampuan untuk bergerak. Bahkan visi besar sekalipun akan sulit diwujudkan apabila organisasi setiap bulan masih disibukkan dengan pertanyaan paling mendasar: dari mana biaya operasional diperoleh?

Persoalan Struktural Pembiayaan PHDI

Kondisi pembiayaan PHDI Pusat selama ini masih memprihatinkan. Sumber pendanaan organisasi sangat terbatas dan belum memiliki skema pendanaan yang benar-benar mandiri dan berkelanjutan.

Sebagian pembiayaan masih bergantung pada bantuan pemerintah, terutama melalui Kementerian Agama cq. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu. Sumber lainnya berasal dari dukungan sponsor maupun sisa pembiayaan kegiatan-kegiatan besar, seperti Dharma Santi Nasional.

Ketika sumber-sumber tersebut tidak tersedia atau tidak mencukupi, kebutuhan operasional organisasi pada akhirnya harus ditutupi melalui kontribusi pribadi beberapa pengurus.

Situasi seperti ini tidak boleh terus dianggap sebagai sesuatu yang normal. PHDI adalah Majelis Keagamaan Tertinggi Umat Hindu Indonesia. Sebuah lembaga dengan kedudukan dan

tanggung jawab sebesar itu seharusnya memiliki sistem pembiayaan kelembagaan yang kuat, transparan, profesional, dan berkelanjutan.

Persoalannya bukan semata-mata PHDI membutuhkan lebih banyak uang. Yang jauh lebih penting adalah membangun arsitektur pembiayaan organisasi yang sehat.

Organisasi yang sehat tidak menggantungkan keberlangsungan hidupnya kepada satu sumber pendanaan. Ketergantungan yang terlalu besar pada satu sumber membuat organisasi rentan ketika terjadi perubahan kebijakan, pergantian kepemimpinan, ataupun krisis ekonomi.

Lebih jauh lagi, kemandirian pembiayaan juga berkaitan dengan kemandirian organisasi. PHDI harus mempunyai ruang yang cukup untuk menjalankan Dharma Agama dan Dharma Negara berdasarkan kepentingan umat, bukan berdasarkan kepentingan pihak yang membiayainya.

Karena itu, ke depan perlu dibangun empat pilar strategi pembiayaan PHDI.

1. Pendanaan APBN dan APBD

Pilar pertama adalah memperjuangkan adanya alokasi pembiayaan kelembagaan bagi majelis-majelis agama melalui APBN dan APBD.

Negara mempunyai kepentingan terhadap keberadaan majelis agama yang kuat karena majelis agama menjalankan fungsi pelayanan, pembinaan, pendidikan, kerukunan, serta menjadi mitra pemerintah dalam menjaga kehidupan keagamaan dan kebangsaan.

Karena itu, perlu diperjuangkan kebijakan nasional, termasuk kemungkinan melalui Peraturan Presiden, yang memberikan

dasar hukum yang jelas mengenai dukungan pembiayaan negara terhadap operasional majelis-majelis agama secara adil, transparan, dan akuntabel.

Skema tersebut harus dirancang sedemikian rupa sehingga dukungan negara tidak berarti intervensi terhadap independensi majelis agama. Dana publik harus dipertanggungjawabkan sebagai dana publik, sementara otoritas keagamaan tetap berada pada majelis agama.

Dengan demikian, hubungan negara dan majelis agama bukan hubungan ketergantungan, melainkan kemitraan kelembagaan yang sehat.

2. Punia Umat melalui *Crowdfunding*

Pilar kedua adalah membangun Gerakan Punia Umat secara modern melalui sistem *crowdfunding*. Potensi kekuatan umat Hindu sesungguhnya sangat besar apabila dibangun berdasarkan prinsip gotong royong. Tidak selalu dibutuhkan sumbangan dalam jumlah besar. Punia dalam jumlah kecil tetapi dilakukan oleh banyak umat secara rutin justru dapat menjadi sumber pendanaan yang kuat dan berkelanjutan.

Teknologi digital memungkinkan PHDI membangun platform punia yang mudah, transparan, dan dapat diakses umat Hindu di seluruh Indonesia maupun diaspora Hindu di luar negeri.

Punia dapat dibedakan setidaknya menjadi dua skema. Pertama, Punia Organisasi, yang diperuntukkan bagi penguatan kelembagaan dan operasional PHDI. Kedua, Punia Umat, yaitu dana yang dihimpun dan disalurkan kembali untuk kepentingan umat, seperti beasiswa pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan kebencanaan, pemberdayaan ekonomi, serta pelayanan sosial lainnya.

Kuncinya adalah kepercayaan. Setiap rupiah yang dihimpun harus dapat diketahui sumber, penggunaan, dan manfaatnya. Karena itu sistem digital harus memungkinkan umat memperoleh laporan penggunaan dana secara terbuka dan berkala.

Dengan cara tersebut, punia bukan sekadar aktivitas memberikan dana, tetapi menjadi bentuk partisipasi umat dalam membangun rumah bersama.

3. *Creative Funding*

Pilar ketiga adalah mengembangkan *creative funding*, yakni berbagai inovasi penggalangan dana yang sah, etis, dan sejalan dengan nilai-nilai Hindu.

PHDI tidak boleh hanya menunggu bantuan datang. Organisasi harus mempunyai kemampuan mengembangkan berbagai kegiatan produktif untuk menopang misinya.

Bentuknya dapat beragam: kerja sama penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan, penerbitan, pengembangan pengetahuan dan konten digital, kegiatan kebudayaan, kerja sama kelembagaan, pengelolaan hak kekayaan intelektual, maupun bentuk-bentuk usaha sosial lainnya.

Namun *creative funding* harus mempunyai batas etik yang tegas. Tidak semua sumber dana yang tersedia layak diterima. Penggalangan dana tidak boleh bertentangan dengan Dharma, tidak boleh menimbulkan konflik kepentingan, tidak boleh memperjualbelikan otoritas keagamaan, dan tidak boleh membuat PHDI tersandera oleh kepentingan politik maupun ekonomi pemberi dana. Karena itu diperlukan pedoman mengenai etika pembiayaan dan penerimaan dana PHDI sebagai bagian dari tata kelola organisasi.

4. Optimalisasi Aset PHDI

Pilar keempat adalah melakukan optimalisasi aset PHDI. Langkah pertama bukan langsung mengomersialkan aset, melainkan melakukan audit dan inventarisasi aset secara menyeluruh. PHDI harus mengetahui secara pasti aset apa yang dimiliki, di mana lokasinya, bagaimana status hukumnya, berapa nilainya, siapa yang selama ini mengelolanya, serta bagaimana pemanfaatannya. Hasil audit tersebut harus menjadi basis penyusunan database aset PHDI yang transparan dan akuntabel.

Setelah status seluruh aset jelas, barulah dilakukan optimalisasi dengan prinsip profesionalisme dan kehati-hatian. Aset yang produktif dapat dikembangkan untuk menghasilkan pendapatan organisasi tanpa kehilangan kepemilikan dan fungsi strategisnya.

Pengelolaan aset tidak boleh dilakukan secara informal ataupun berdasarkan hubungan personal. Diperlukan tata kelola profesional, mekanisme pengawasan, audit berkala, serta pertanggungjawaban yang jelas kepada organisasi dan umat. Dari *Fundraising Menuju Financial Sustainability*

Kesimpulan

Empat strategi tersebut—pendanaan APBN/APBD, *crowdfunding* atau Gerakan Punia Umat, *creative funding*, dan optimalisasi aset—tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Semuanya harus menjadi bagian dari satu desain besar menuju kemandirian dan keberlanjutan pembiayaan PHDI.

Karena itu, PHDI ke depan juga membutuhkan sistem pengelolaan keuangan modern: perencanaan anggaran tahunan, standar akuntansi yang jelas, audit independen, laporan keuangan berkala, sistem pembayaran digital, serta keterbukaan informasi kepada umat.

Prinsip dasarnya sederhana: semakin besar dana yang dipercayakan umat dan negara kepada PHDI, semakin tinggi pula standar transparansi dan akuntabilitas yang harus diterapkan.

Pada akhirnya, kemandirian pembiayaan bukan semata-mata persoalan uang. Ini adalah persoalan marwah, kemandirian, kepercayaan, dan kapasitas kelembagaan.

Kita tidak dapat membangun PHDI sebagai Majelis Keagamaan Tertinggi Umat Hindu Indonesia yang kuat apabila kebutuhan operasional bulanannya saja masih bergantung pada kantong pribadi pengurus.

PHDI harus bertransformasi dari organisasi yang setiap saat mencari dana untuk bertahan hidup, menjadi organisasi yang mempunyai sistem pembiayaan mandiri, terdiversifikasi, profesional, transparan, dan berkelanjutan.

Dengan fondasi pembiayaan yang kuat, PHDI dapat lebih leluasa menjalankan Dharma: memperkuat *sradha*, melayani umat, menjaga persatuan, meningkatkan kesejahteraan, serta hadir menjawab berbagai tantangan umat Hindu Nusantara.

Kemandirian dana adalah salah satu fondasi kemandirian organisasi. Dan kemandirian organisasi adalah syarat penting untuk mengembalikan marwah PHDI sebagai rumah bersama umat Hindu Nusantara.

99

Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Mangrawa. Dalam keragaman selalu terdapat yang menyatukan. Kesatuan tidak pernah menuntut hilangnya keragaman. Karena itu, membangun Hindu Nusantara membutuhkan keseimbangan antara *Aneka Twa* dan *Eka Twa*. Kita harus menghindari dua tarikan ekstrem.

05

**PURA DAN DESA ADAT
SEBAGAI BENTENG
EKONOMI UMAT HINDU
NUSANTARA**

PURA DAN DESA ADAT SEBAGAI BENTENG EKONOMI UMAT HINDU NUSANTARA

Tujuan beragama Hindu sesungguhnya tidak berhenti pada pencapaian kebahagiaan rohani. Rumusan Moksartham Jagadhita Ya Ca Iti Dharma menegaskan dua tujuan yang berjalan beriringan: moksa, pembebasan dan kebahagiaan rohani, serta jagadhita, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan dunia.

Dengan demikian, membangun kesejahteraan umat bukan agenda yang berada di luar agama. Ia justru merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran-ajaran Dharma. Dalam konteks kehidupan berbangsa, spirit jagadhita juga bertemu dengan cita-cita negara sebagaimana termaktub dalam Pancasila: dan Konstitusi; mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pertanyaannya kemudian: bagaimana menjadikan nilai jagadhita itu sebagai gerakan nyata untuk meningkatkan kualitas kehidupan umat Hindu? Upaya tersebut memerlukan strategi dan ikhtiar bersama. PHDI sebagai Majelis Keagamaan Tertinggi umat Hindu perlu menjadi poros yang menyatukan arah dan membangun sinergi. Namun PHDI tentu tidak mungkin bergerak sendiri. Diperlukan kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan Hindu, lembaga pendidikan, desa adat, pura, pasraman, koperasi, pelaku usaha, perguruan tinggi, pemerintah, serta berbagai kekuatan umat lainnya. Dengan semangat itu, saya menawarkan lima strategi pemberdayaan umat Hindu.

1. Memaknai Ulang Manusa Yadnya

Pertama, kita perlu memperluas pemaknaan Manusa Yadnya. Selama ini Manusa Yadnya lebih sering dipahami dalam dimensi ritual yang menyertai tahapan kehidupan manusia. Pemaknaan tersebut penting, tetapi perlu diperluas: Manusa Yadnya harus menjadi spirit untuk membangun manusia Hindu yang paripurna—sehat secara fisik, kuat secara mental-spiritual, cerdas, terampil, produktif, dan memiliki kepedulian sosial.

Karena itu, Manusa Yadnya perlu diterjemahkan menjadi perhatian terhadap manusia sepanjang life cycle: sejak dalam kandungan, masa balita, anak-anak, remaja, usia produktif, hingga memasuki usia lanjut.

Pada setiap tahap kehidupan tersebut kualitas manusia harus dijaga. Jangan sampai kita begitu khusyuk menyelenggarakan upacara untuk manusia, tetapi kurang memberikan perhatian terhadap kualitas manusia yang menjalani kehidupan itu sendiri. Ritual dan pemberdayaan tidak perlu dipertentangkan. Keduanya justru harus berjalan bersama sebagai ekspresi nilai-nilai luhur ajaran *Dharma*.

2. Memastikan Kesehatan Umat

Kedua, memastikan umat Hindu memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Negara memiliki kewajiban memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh warga negara. Karena itu, PHDI bersama organisasi-organisasi Hindu perlu memastikan umat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil dan kantong-kantong Hindu di luar Bali, memperoleh akses terhadap berbagai program kesehatan negara.

Pada saat yang sama, Hindu Nusantara memiliki kekayaan pengetahuan mengenai kesehatan tradisional yang tersimpan dalam sastra, lontar, tradisi pengobatan, pengetahuan tanaman obat, serta praktik-praktik kesehatan masyarakat.

Warisan tersebut perlu dikaji secara ilmiah, dikembangkan dan dipertemukan dengan ilmu kesehatan modern sehingga dapat berkontribusi dalam pendekatan promotif, preventif, dan kuratif, dengan tetap memenuhi standar keamanan dan pelayanan kesehatan. Dengan demikian, warisan pengetahuan Hindu tidak hanya tersimpan sebagai khazanah masa lalu, tetapi memberikan manfaat nyata bagi kehidupan manusia hari ini.

3. Pendidikan sebagai Jalan Mobilitas Umat

Ketiga, memastikan umat Hindu mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, mulai dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan menengah hingga pendidikan tinggi.

Tidak boleh ada anak Hindu yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas karena kemiskinan, keterpencilan wilayah ataupun keterbatasan fasilitas.

Pemenuhan guru agama Hindu juga harus terus diperjuangkan. Demikian pula bahan ajar pendidikan agama Hindu perlu memberi ruang yang memadai terhadap kekayaan dan kearifan lokal Hindu Nusantara.

Di sinilah pendidikan formal perlu diperkuat dengan pendidikan pasraman. Pasraman jangan hanya diposisikan sebagai tempat belajar agama dalam arti sempit, tetapi dikembangkan sebagai pusat pembentukan karakter, seni-budaya, literasi, teknologi dan keterampilan.

Dengan model demikian, pendidikan Hindu membangun manusia yang berakar kuat pada *Dharma* dan kebudayaannya, tetapi sekaligus memiliki kemampuan menghadapi perubahan zaman.

4. Dari Pencari Kerja Menjadi Pencipta Lapangan Kerja

Keempat, kita harus memberikan perhatian khusus terhadap generasi muda Hindu.

Pendidikan generasi muda tidak cukup diarahkan agar mereka memperoleh ijazah dan kemudian mencari pekerjaan. Kita perlu menumbuhkan karakter kewirausahaan agar semakin banyak anak muda Hindu mampu menciptakan lapangan pekerjaan.

Mereka perlu diperkenalkan dengan kewirausahaan, literasi keuangan, teknologi digital, ekonomi kreatif, pertanian modern, pariwisata, industri budaya serta berbagai sektor ekonomi baru. Tetapi kewirausahaan Hindu bukan semata-mata mengejar keuntungan individual. Spiritnya harus tetap bersumber pada

Dharma: bekerja, mencipta dan memperoleh kesejahteraan sekaligus memberikan manfaat bagi sesama.

Dari sinilah kita memasuki strategi kelima yang sangat penting: membangun ekosistem ekonomi umat.

5. Desa Adat sebagai Benteng Ekonomi Umat di Bali

Di Bali, salah satu kekuatan terbesar umat Hindu adalah Desa Adat. Desa Adat merupakan persekutuan masyarakat hukum adat yang kehidupan sosial dan kebudayaannya sangat erat dengan agama Hindu. Karena itu, Desa Adat tidak semestinya hanya dilihat dalam urusan parahyangan.

Filosofi Tri Hita Karana mengajarkan keseimbangan parahyangan, pawongan, dan palemahan. Memperkuat kesejahteraan krama merupakan bagian penting dari dimensi pawongan tersebut.

Karena itu, Desa Adat perlu menjadi salah satu benteng ekonomi umat Hindu di Bali. Caranya adalah membangun ekonomi sirkular di tingkat Desa Adat. Potensi ekonomi yang dimiliki umat harus dihubungkan sehingga produksi, distribusi dan konsumsi saling memperkuat.

Badan Usaha Milik Desa Adat perlu dikembangkan secara profesional. Aset Desa Adat, termasuk potensi ekonomi pelaba pura, dapat dikelola secara produktif dengan tetap menjaga kesucian, fungsi sosial-keagamaan, ketentuan adat, dan keberlanjutannya. Pada saat bersamaan, LPD dan koperasi-koperasi berbasis banjar perlu diperkuat dan disinergikan dengan kegiatan ekonomi masyarakat.

Bayangkan apabila kebutuhan upacara, pangan, kerajinan, jasa, produk pertanian dan berbagai kebutuhan masyarakat sebisa mungkin diproduksi dan dipasarkan melalui jaringan ekonomi lokal.

Perputaran uang tidak cepat keluar dari komunitas, tetapi berputar kembali untuk memperkuat kesejahteraan krama Inilah esensi ekonomi sirkular: nilai ekonomi yang lahir dari komunitas kembali memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada komunitas.

Pura sebagai Benteng Ekonomi Umat di Luar Bali

Situasinya berbeda di luar Bali. Umat Hindu hidup tersebar sebagai diaspora dengan jumlah dan kondisi sosial-ekonomi yang sangat beragam. Mereka tidak selalu memiliki kelembagaan seperti Desa Adat di Bali. Namun umat Hindu mempunyai satu simpul sosial yang sangat kuat: Pura.

Di banyak daerah, Pura sesungguhnya telah berkembang melampaui fungsi sebagai tempat persembahyangan. Pura menjadi tempat umat bertemu, membangun solidaritas, mendidik anak melalui pasraman, melestarikan seni-budaya serta menyelesaikan berbagai persoalan bersama.

Pengalaman umat Hindu di Palu, misalnya, menunjukkan bagaimana Pura dapat berkembang sebagai simpul spiritual, pendidikan sekaligus pemberdayaan. Praktik serupa juga dapat ditemukan dan dikembangkan di Banyuwangi, Lumajang serta berbagai kantong umat Hindu lainnya. Pengalaman tersebut harus dikembangkan menjadi suatu strategi nasional.

Tentu bukan berarti Pura dijadikan tempat berdagang dan kehilangan kesuciannya. Kesucian Pura harus tetap dijaga. Yang perlu dibangun adalah ekosistem ekonomi umat yang bertumbuh dari komunitas yang berhimpun di sekitar Pura. Pura menjadi simpul sosial dan spiritual, sedangkan aktivitas ekonominya dilembagakan melalui koperasi atau badan hukum ekonomi lainnya yang dikelola secara profesional, transparan dan akuntabel.

Membangun Ekonomi Sirkular Umat

Prinsip utamanya sederhana: dari umat, oleh umat, dan untuk kesejahteraan umat.

Jika ada umat yang menghasilkan produk pertanian, komunitas membantu membuka pasarnya. Jika ada yang memproduksi kebutuhan upacara, jaringan umat membantu distribusinya.

Jika ada anak muda membangun usaha digital, kuliner, kerajinan ataupun industri kreatif, komunitas membantu mempertemukannya dengan pasar, pembiayaan, pelatihan dan jejaring usaha.

Produsen Hindu dipertemukan dengan distributor Hindu dan konsumen Hindu tanpa membangun eksklusivisme ekonomi. Sebaliknya, basis internal yang kuat justru menjadi modal untuk berinteraksi, berkompetisi dan berkolaborasi secara terbuka dengan masyarakat luas.

Dalam kerangka tersebut, PHDI dapat mengambil posisi strategis sebagai pengarah, penghubung dan orkestrator ekosistem. PHDI tidak harus menjadi pelaku bisnis. Justru organisasi ekonomi umat harus dijalankan oleh lembaga yang profesional dan memiliki kompetensi di bidangnya.

PHDI bersama organisasi kemasyarakatan Hindu dapat memetakan potensi ekonomi umat, mempertemukan jaringan koperasi, pengusaha dan UMKM Hindu, membuka akses pembiayaan, memperkuat pelatihan kewirausahaan serta membangun jaringan pemasaran antardaerah.

Dengan demikian akan terbentuk jaringan ekonomi Hindu Nusantara: Desa Adat menjadi salah satu benteng ekonomi umat

di Bali, sedangkan Pura menjadi simpul penguatan komunitas dan pemberdayaan ekonomi umat di luar Bali.

Transformasi PHDI untuk Mewujudkan Jagadhita

Pada akhirnya, PHDI harus menghadirkan kemanfaatan nyata bagi kehidupan umat Hindu di seluruh penjuru Nusantara. PHDI harus membawa cara berpikir baru yang perlu terus diedukasi di kalangan umat, bahwa Pura yang kokoh bukan hanya Pura yang megah bangunannya, tetapi Pura yang mampu menguatkan *sradha*, membangun persaudaraan, mencerdaskan generasi dan menggerakkan solidaritas umat.

Demikian pula Desa Adat yang kuat bukan hanya Desa Adat yang mampu menyelenggarakan upacara dengan baik, tetapi juga yang mampu menjaga alam, merawat kebudayaan dan meningkatkan kesejahteraan krama-nya. Inilah makna *Moksartham Jagadhita Ya Ca Iti Dharma* dalam konteks kehidupan umat Hindu hari ini. Dharma harus menuntun menuju moksa, tetapi Dharma juga harus menghadirkan jagadhita.

Karena itu, agenda besar umat Hindu ke depan bukan sekadar memperkuat kelembagaan keagamaan, tetapi membangun manusia Hindu yang sehat, terdidik, berkarakter, produktif dan mandiri secara ekonomi. Dan untuk mewujudkannya, kita memiliki kekuatan yang sudah hidup di tengah umat: Desa Adat di Bali dan Pura di seluruh Nusantara. Keduanya harus kita perkuat bukan hanya sebagai benteng Dharma dan kebudayaan, tetapi juga sebagai benteng pemberdayaan dan kemandirian ekonomi umat Hindu Nusantara.

99

Masa depan Hindu Nusantara sangat bergantung pada kemampuan kita mengelola hubungan antara kesatuan dan keragaman. PHDI harus berdiri di tengah: tidak menjadi kekuatan penyeragaman, tetapi juga tidak membiarkan umat berjalan sendiri-sendiri tanpa titik temu.

06

**MENYIAPKAN
ANGKATAN MUDA
HINDU NUSANTARA**

MENYIAPKAN ANGKATAN MUDA HINDU NUSANTARA

Angkatan muda Hindu bukan hanya bagian dari umat hari ini. Mereka adalah wajah mayoritas umat hari ini sekaligus penentu masa depan Hindu Nusantara. Karena itu, membicarakan masa depan umat Hindu pada dasarnya adalah membicarakan bagaimana kita mempersiapkan generasi mudanya.

Perubahan struktur demografi Indonesia memberikan pesan yang sangat jelas. Dari sekitar 290 juta penduduk Indonesia, sekitar 201 juta jiwa atau 69,30 persen berada pada usia produktif 15–64 tahun. Gen Z yang berada pada kisaran usia 14–29 tahun berjumlah sekitar 75,4 juta jiwa atau 25,98 persen, disusul generasi Milenial usia 30–45 tahun sekitar 68,5 juta jiwa atau 23,6 persen. Sementara itu, Gen Alpha juga terus tumbuh menjadi kelompok demografis yang sangat besar.

Walaupun komposisi demografi umat Hindu tentu memiliki karakteristik tersendiri di setiap daerah, perubahan struktur penduduk nasional tersebut memberikan gambaran penting tentang arah perubahan umat Hindu Indonesia. Artinya, PHDI tidak cukup hanya memikirkan bagaimana melayani umat hari ini, tetapi harus mulai membangun strategi untuk menyiapkan angkatan muda Hindu Nusantara menghadapi masa depan.

Enam Strategi Transformasi Memperkuat Anak Muda Hindu Nusantara

Pertama, membangun pendekatan keagamaan yang berbicara dengan dunia anak muda. Generasi muda hidup dengan pengalaman, bahasa, kegelisahan, dan tantangan yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Karena itu, pendekatan dalam memperdalam *Sradha* dan *Bhakti*, baik melalui *Dharma Panuntun*, *Dharma Wacana* maupun pendidikan keagamaan, harus sensitif terhadap karakter generasi tersebut.

PHDI harus mampu menangkap pertanyaan-pertanyaan yang sedang dihadapi anak muda: tentang identitas, masa depan, pendidikan, pekerjaan, relasi sosial, kesehatan mental, teknologi, lingkungan hidup, hingga bagaimana menjalani kehidupan spiritual di tengah perubahan zaman yang sangat cepat.

Ajaran Hindu sesungguhnya memiliki kekayaan *tattwa* dan nilai yang dapat menjadi tuntunan menghadapi berbagai persoalan tersebut.

Tantangannya adalah bagaimana Dharma disampaikan dengan bahasa yang dapat dipahami dan dirasakan relevansinya oleh generasi muda.

Karena itu, cara berkomunikasi dan berinteraksi menjadi faktor penting. Kita tidak bisa mengajak generasi baru memperdalam nilai-nilai ajaran Dharma hanya dengan menggunakan cara komunikasi generasi lama.

Kedua, memperkuat Sradha di tengah kehidupan digital. Generasi muda tumbuh dalam dunia yang berbeda. Dunia digital bukan lagi sekadar alat komunikasi, tetapi telah menjadi ruang hidup baru.

Pada awal 2025, jumlah identitas pengguna media sosial di Indonesia telah mencapai sekitar 143 juta. Penetrasi internet di kalangan Gen Z juga sangat tinggi. Mereka belajar, bekerja, membangun jaringan sosial, memperoleh informasi, bahkan membentuk pandangan hidup melalui ruang digital.

Di satu sisi, teknologi membuka akses yang luar biasa terhadap pengetahuan. Tetapi di sisi lain, generasi muda menghadapi banjir informasi, disinformasi, manipulasi algoritma, budaya instan, serta berbagai nilai yang belum tentu sejalan dengan Dharma.

Karena itu, PHDI harus hadir lebih kuat di ruang digital. Kita membutuhkan Dharma Digital: ekosistem konten Hindu yang edukatif, inspiratif, kredibel, menarik, dan mudah diakses generasi muda. Literasi digital harus berjalan beriringan dengan literasi keagamaan sehingga kemajuan teknologi tidak menjauhkan generasi muda dari akar spiritualnya.

Anak muda Hindu jangan hanya menjadi konsumen teknologi. Mereka harus didorong menjadi produsen pengetahuan dan kreator Dharma di ruang digital.

Ketiga, menyiapkan generasi muda menghadapi dunia kerja. Tantangan generasi muda tidak hanya berkaitan dengan Sradha, tetapi juga masa depan kehidupannya.

Data kependudukan menunjukkan masih besarnya jumlah penduduk yang belum bekerja, sementara kelompok terbesar dalam struktur pekerjaan berada dalam kategori wiraswasta, yang di dalamnya juga mencakup berbagai bentuk pekerjaan informal.

Perubahan teknologi, otomatisasi, kecerdasan buatan, dan perubahan struktur ekonomi akan membuat persaingan dunia kerja semakin keras. Lapangan pekerjaan konvensional tidak selalu tumbuh secepat jumlah anak muda yang memasuki pasar kerja.

Karena itu, pemberdayaan umat harus dimulai sejak generasi muda. PHDI perlu membangun kolaborasi dengan perguruan tinggi, dunia usaha, profesional Hindu, lembaga pelatihan, dan jaringan diaspora untuk membuka akses pendidikan, beasiswa, peningkatan keterampilan, mentoring, magang, kewirausahaan, serta jaringan kerja bagi anak muda Hindu. Sradha yang kuat harus berjalan bersama kemampuan untuk hidup mandiri dan bermartabat. Inilah bagian dari ikhtiar mewujudkan umat yang Jagadhita.

Keempat, menumbuhkan generasi muda yang peduli terhadap persoalan umat dan bangsa. Mereka perlu memiliki kepekaan terhadap berbagai persoalan struktural yang terjadi di sekitarnya: kemiskinan, kebodohan, ketimpangan, keterbelakangan, kerusakan lingkungan, krisis air, sampah, perubahan iklim, serta berbagai bentuk ketidakadilan sosial.

Kepedulian terhadap persoalan tersebut merupakan bagian dari praktik Dharma. PHDI harus membuka lebih banyak ruang bagi generasi muda untuk melakukan Manawa Seva dan Madhawa Seva: menghadirkan Dharma melalui pelayanan kepada sesama manusia dan kehidupan. Dengan demikian, agama tidak berhenti

sebagai pengetahuan dan ritual, tetapi menjadi kekuatan yang mendorong transformasi sosial.

Kelima, mengajak anak muda tetap berakar pada kebudayaan Hindu Nusantara.

Menjadi modern tidak berarti tercerabut dari akar. Justru dalam dunia yang semakin terbuka dan seragam, identitas kebudayaan menjadi semakin penting. Generasi muda Hindu harus memiliki kesempatan untuk mengenal, mencintai, mengembangkan, dan mewariskan sastra, bahasa, seni, tradisi, dan dresta yang hidup di berbagai komunitas Hindu Nusantara.

Hindu Nusantara memiliki kekayaan yang luar biasa. Bali, Jawa, Tengger, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, Sumatra dan berbagai wilayah lainnya memiliki ekspresi budaya Hindu yang tumbuh dalam perjalanan sejarah masing-masing.

PHDI harus menjadi ruang yang merawat kebhinnekaan tersebut. Program sastra, seni pertunjukan, bahasa daerah, digitalisasi manuskrip, festival budaya, sekolah budaya, hingga ruang kreativitas anak muda perlu diperluas. Bahkan teknologi digital dan AI dapat dimanfaatkan untuk mendokumentasikan sekaligus memperkenalkan kekayaan Hindu Nusantara kepada generasi baru. Dengan demikian, generasi muda dapat bergerak maju mengikuti zaman tanpa kehilangan akar tempat mereka berpijak.

Keenam, memberikan ruang kepemimpinan kepada generasi muda. Pada akhirnya, generasi muda tidak cukup hanya dijadikan objek pembinaan. Mereka harus menjadi subjek dan pelaku utama perubahan.

Karena itu, PHDI perlu membuka ruang keterlibatan yang semakin luas bagi anak-anak muda dalam organisasi dan kegiatan keumatan.

KMHDI, Peradah, Prajaniti, organisasi mahasiswa Hindu, komunitas seni dan budaya, komunitas profesional, kelompok kewirausahaan, hingga berbagai komunitas kreatif anak muda harus menjadi bagian dari ekosistem besar pembangunan umat.

PHDI juga perlu memberikan ruang yang lebih besar bagi generasi muda dalam program-programnya, termasuk dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Kita harus berani memberikan mereka ruang untuk belajar, ruang untuk berkarya, ruang untuk berinovasi, dan pada waktunya ruang untuk memimpin.

Menyiapkan Generasi, Menyiapkan Masa Depan

Bonus demografi tidak otomatis menjadi berkah. Ia dapat menjadi kekuatan besar apabila generasi mudanya memiliki Sradha yang kokoh, pengetahuan yang luas, keterampilan yang memadai, kemandirian ekonomi, kepedulian sosial-ekologis, akar kebudayaan yang kuat, dan ruang untuk memimpin.

Karena itu, menyiapkan Angkatan Muda Hindu Nusantara harus menjadi salah satu agenda strategis PHDI ke depan. Kita membutuhkan generasi Hindu yang mampu berdiri kokoh di atas akar Dharma dan Kebudayaan Nusantara, tetapi pada saat yang sama memiliki keberanian menjelajahi dunia baru: menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan AI; mampu berkompetisi secara global; peduli kepada sesama dan alam; serta memiliki keberanian mengambil tanggung jawab kepemimpinan.

Berakar pada Dharma, bertumbuh dalam kebudayaan, menguasai zaman, dan berkarya untuk umat, bangsa, serta kemanusiaan. Sebab, ketika kita menyiapkan angkatan muda Hindu hari ini, sesungguhnya kita sedang menyiapkan wajah Hindu Nusantara untuk masa depan.

99

Dengan Wiku yang teguh dalam sesana, luas dalam pengetahuan, dalam dalam kebijaksanaan, dan dekat dengan persoalan umat, kependitaan akan kembali menjadi sumber cahaya dari nilai-nilai luhur ajaran Dharma.

07

**MEMULIHKAN
KEHORMATAN WIKU
UNTUK KEJAYAAN HINDU
NUSANTARA**

MEMULIHKAN KEHORMATAN WIKU UNTUK KEJAYAAN HINDU NUSANTARA

Dalam ajaran Hindu, Wiku atau Pandita menempati posisi yang luhur dan terhormat. Kehormatan itu bukan semata-mata karena gelar, busana, atau kedudukan ritual, melainkan karena swadharma yang dijalankannya. Wiku menjadi penjaga kesucian ajaran, sumber tuntunan, sekaligus tempat umat mencari kejernihan ketika menghadapi berbagai persoalan kehidupan.

Setidaknya terdapat empat peran utama yang melekat pada seorang Wiku, yakni Sang Apta, Satyawadi, Patirtan Jagad, dan Panadahan Upadesa. Sebagai Sang Apta, Wiku adalah pribadi yang dapat dipercaya karena memiliki kedalaman pengetahuan, kematangan rohani, dan keteguhan perilaku. Sebagai Satyawadi, Wiku berdiri di atas kebenaran dan menyuarakan kebenaran dengan kebijaksanaan. Sebagai Patirtan Jagad, Wiku menjadi sumber penyucian dan kejernihan bagi kehidupan. Sedangkan sebagai Panadahan Upadesa, Wiku menjadi tempat umat memperoleh tuntunan Dharma dalam menjalani kehidupan.

Keempat peran luhur tersebut hanya dapat dijalankan apabila seorang Wiku berpegang teguh pada *sesana kawikon*. Karena itu, *sesana* bukan sekadar seperangkat aturan dan etika yang membatasi seorang Wiku, tetapi jalan menjaga kesucian, kewibawaan, dan kehormatan *kawikon*.

Dari Surya Sewana menuju Loka Pala Sraya

Swadharma seorang Wiku juga tidak berhenti pada pelaksanaan ritual. Setiap hari melalui *Surya Sewana*, Wiku memanjatkan doa bagi keselamatan dan keharmonisan alam semesta beserta seluruh isinya. Doa seorang Wiku melampaui kepentingan pribadi, keluarga, bahkan kelompoknya.

Namun, panggilan seorang Wiku juga hadir dalam kehidupan sosial melalui *Loka Pala Sraya*: mengabdikan dirinya untuk melindungi, mengayomi, dan memberikan tuntunan kepada umat. Karena itu, kehadiran seorang Wiku semestinya dirasakan umat, tidak hanya ketika memimpin yajña, tetapi juga ketika umat membutuhkan tuntunan menghadapi perubahan sosial, persoalan keluarga, pendidikan generasi muda, tekanan ekonomi, perkembangan teknologi, hingga berbagai problem moral dan kemanusiaan.

Di sinilah tantangan kependitaan Hindu hari ini semakin besar. Di tengah umat muncul kegelisahan terhadap perilaku segelintir oknum Wiku yang dipersepsikan "*nilar sesana*", meninggalkan atau keluar dari *sesana kawikon*. Pada era media sosial, perilaku seorang tokoh keagamaan dengan mudah menjadi perhatian publik dan bahkan dapat melahirkan hujatan serta polemik yang meluas. Persoalannya, penilaian terhadap satu atau beberapa oknum dapat dengan cepat berubah menjadi persepsi terhadap institusi kependitaan secara keseluruhan.

Pada saat yang sama, ekspektasi umat terhadap Wiku juga berubah. Umat berharap Wiku tidak hanya hadir dalam wilayah ritual, tetapi mampu memberikan *Dharma Panuntun* dan edukasi dalam menghadapi persoalan kehidupan yang semakin kompleks.

Keadaan ini tidak boleh dibiarkan berkembang tanpa jalan keluar. Yang dibutuhkan adalah membangun sistem yang mampu menjaga, memperkuat, sekaligus memulihkan kehormatan institusi kependitaan.

Dalam konteks inilah PHDI sebagai Majelis Keagamaan Tertinggi umat Hindu, khususnya Sabha Pandita, harus mengambil peran yang lebih aktif. Ada tujuh langkah yang dapat dilakukan.

Pertama, Menghormati Kebhinnekaan Sistem Kependitaan Hindu Nusantara

Hindu Nusantara tumbuh dalam kekayaan adat, tradisi, dan dresta. Karena itu, sistem kependitaan tidak dapat diseragamkan. PHDI harus menghormati sistem kependitaan yang hidup dalam setiap komunitas Hindu Nusantara, baik mengenai aguron-guron, proses inisiasi atau padiksan/dwijati, bhiseka, hubungan guru-sisya, maupun tata kehidupan rohaniawannya.

Masyarakat Hindu Tengger, misalnya, mengenal mekanisme *Mulunen* saat Yadnya Kasada dalam pengangkatan Dukun Pandita. Pada komunitas Hindu Kaharingan, ada Basir yang memimpin ritual keagamaan, menyampaikan doa kepada Ranying Hatalla Basir. Itu artinya, setiap komunitas Hindu Nusantara memiliki sistem kependitaan lokal. Sistem kependitaan itu tidak selalu sama dengan apa yang berkembang di Bali, baik sistem aguron-guron ataupun tata titi ritual padiksannya.

Karena itu, PHDI tidak perlu menjadi lembaga yang menyeragamkan seluruh tradisi tersebut. Sebaliknya, PHDI harus mengakui, menghormati, dan membantu setiap komunitas merumuskan tata titi kependitaannya agar mempunyai pedoman yang jelas sesuai sastra, adat, tradisi, dan dresta masing-masing.

Kesatuan Hindu Nusantara tidak harus dibangun melalui penyeragaman. Kesatuan justru dapat tumbuh dari penghormatan terhadap keragaman yang memiliki nilai-nilai ajaran Dharma yang sama.

Kedua, Memperkuat Pendidikan Calon Pandita

Penguatan institusi kependitaan harus dimulai jauh sebelum seseorang menjadi Wiku. Karena itu, sistem pendidikan calon Pandita perlu diperkuat. PHDI dapat membantu menyiapkan bahan ajar yang melengkapi sistem pendidikan kependitaan yang telah hidup dalam setiap komunitas. Dalam tradisi Bali, bahan tersebut dapat disampaikan/dihaturkan kepada calon Tri Guru untuk memperkaya proses aguron-guron. Pada komunitas Hindu di luar Bali, mekanismenya disesuaikan dengan sistem kependitaan setempat.

Materi yang diberikan tidak hanya mengenai sastra dan ritual, tetapi memberikan perhatian besar pada *sesana kawikon*, termasuk

etika berperilaku, etika berbicara/ berkomunikasi, termasuk etika bermedia sosial.

Selain itu, calon Wiku perlu memperoleh pengetahuan dasar mengenai kajian psikologi, kajian sosiologi, perubahan sosial, keluarga, generasi muda, serta ekonomi keumatan. Bukan untuk mengubah Wiku menjadi psikolog, sosiolog, atau ekonom, tetapi agar memiliki cakrawala yang memadai untuk memahami persoalan umat yang datang memohon tuntunan. Dengan demikian, Wiku tidak hanya memiliki kedalaman spiritual, tetapi juga kepekaan sosial dan keluasan wawasan.

Ketiga, Meningkatkan Kualitas Diksa Pariksa

Diksa Pariksa tidak boleh berhenti sebagai prosedur administratif atau seremoni menjelang padiksan. Diksa Pariksa harus menjadi proses yang sungguh-sungguh untuk melihat kesiapan seseorang memasuki jalan kawikon: kesungguhan niatnya, perjalanan aguron-guronnya, integritas pribadinya, pemahaman terhadap sesana, kematangan spiritual, serta kompetensinya dalam menjalankan swadharma.

Dalam proses tersebut PHDI dapat memberikan *matur paungu*, saran, dan pertimbangan kepada calon Nabe, sementara keputusan tetap menghormati otoritas dan tata titi sistem aguron-guron. Dengan cara demikian, Diksa Pariksa menjadi instrumen untuk membantu menjaga kualitas sekaligus kehormatan institusi kependitaan.

Keempat, Menjaga Mutu Diksa dan Aguron-guron

Sabha Pandita perlu memberikan Bhisama atau Kesatuan Tafsir mengenai standar kepatutan dalam proses padiksan, termasuk perlunya menghindari praktik diksa massal yang berpotensi

mengurangi kedalaman proses aguron-guron dan pengujian kesiapan calon Wiku.

Padiksan bukan sekadar perubahan status. Ia merupakan perjalanan spiritual yang membutuhkan proses pembelajaran, pendalaman sastra, pembentukan karakter, penghayatan sesana, dan hubungan guru-siswa yang mendalam.

Demikian pula, seseorang yang menjalankan fungsi sebagai Nabe harus benar-benar memiliki kematangan, pengalaman, kemampuan membimbing siswa, dan kualifikasi yang memadai.

PHDI tidak perlu mengambil alih hubungan suci antara Nabe dan siswa. Namun Sabha Pandita mempunyai tanggung jawab moral untuk membangun rambu-rambu bersama demi menjaga marwah kependitaan.

Kelima, Membangun Mekanisme Penjagaan Sesana yang Bermartabat

Ketika muncul laporan mengenai dugaan pelanggaran sesana, penyelesaiannya tidak semestinya pertama-tama dilakukan melalui penghakiman di media sosial. PHDI harus mempunyai mekanisme internal yang adil, hati-hati, berjenjang, dan tetap menghormati tata titi kependitaan.

Apabila terdapat pengaduan yang patut ditindaklanjuti, PHDI dapat menyampaikan *matur paungu* kepada Guru Nabe dan Guru Saksi. Apabila mekanisme tersebut belum menghasilkan penyelesaian, Sabha Pandita dapat mengundang Tri Guru (Guru Napak/ Nabe, Guru Waktra dan Guru Saksi), untuk bermusyawarah dan melakukan klarifikasi secara bermartabat. Dengan demikian, Tri Guru, terutama Guru Saksi, didorong untuk menjalankan perannya dalam menjaga putra dharma agar tetap berada dalam sesana.

Apabila Tri Guru sudah tidak ada, Sabha Pandita bersama para *Guru Putra* (jika diperlukan *semeton Wiku di Dharma*), dapat mencari penyelesaian berdasarkan sastra dan dresta, dengan tetap menjunjung prinsip kehati-hatian, keadilan, klarifikasi, dan pemulihan.

Untuk Wiku di luar Bali, mekanisme tersebut tentu harus menyesuaikan tata titi kependitaan komunitas masing-masing. Prinsipnya bukan penyeragaman mekanisme, melainkan kesamaan komitmen menjaga sesana dan kehormatan Wiku.

Keenam, Memuliakan Wiku melalui Rsi Yadnya

Menuntut Wiku menjalankan sesana harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab umat untuk memuliakan dan menjaga kehidupan Wiku. Karena itu, pemulihan kehormatan kependitaan juga harus diwujudkan melalui penguatan *Rsi Yadnya*.

PHDI perlu mengembangkan sistem pelayanan kepada para Pandita, antara lain melalui jaminan pelayanan kesehatan seperti kepesertaan BPJS Kesehatan, dukungan Rsi Bojana untuk kebutuhan keseharian, serta skema perlindungan sosial yang memungkinkan, termasuk manfaat yang berkaitan dengan kematian melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan yang sesuai ketentuan.

Jangan sampai umat menuntut Wiku sepenuhnya mengabdikan hidupnya untuk Dharma Agama, tetapi pada saat yang sama membiarkan Wiku menghadapi sendiri persoalan dasar kehidupannya. Sesana adalah kewajiban Wiku; Rsi Yadnya adalah kewajiban umat. Keduanya harus berjalan bersama.

Ketujuh, Membangun Ruang Belajar Bersama Para Wiku

Padiksan bukanlah akhir dari proses belajar. Justru setelah menjadi Wiku, proses memperdalam pengetahuan dan kebijaksanaan harus terus berlangsung.

Sabha Pandita perlu menyelenggarakan forum-forum reguler untuk penyegaran, berbagi pengalaman, dan peningkatan kompetensi para Wiku. Bentuknya dapat berupa rembug sastra, kajian agama kontekstual, diskusi persoalan keumatan, perkembangan sosial, teknologi digital, keluarga, lingkungan hidup, hingga tantangan generasi muda.

Sabha Welaka dapat mendukung forum tersebut dengan menyediakan kajian, hasil penelitian, data, dan perspektif dari berbagai disiplin ilmu. Dengan demikian tercipta hubungan produktif antara kedalaman spiritual Sabha Pandita dan kekayaan pengetahuan Sabha Welaka.

Forum semacam ini penting agar para Wiku memiliki ruang untuk saling berbagi pengalaman, memperbarui wawasan, sekaligus membangun kesatuan pandangan dalam memberikan Dharma Panuntun kepada umat.

Memuliakan Wiku, Memperkuat Hindu Nusantara

Pemulihan kehormatan Wiku tidak dapat dilakukan hanya dengan menuntut kepatuhan terhadap sesana. Kita membutuhkan sebuah ekosistem kependitaan yang utuh: aguron-guron yang kuat, proses diksa yang berkualitas, Diksa Pariksa yang sungguh-sungguh, mekanisme penjagaan sesana yang bermartabat, pendidikan berkelanjutan, serta jaminan kesejahteraan melalui Rsi Yadnya.

\PHDI dan Sabha Pandita harus berdiri di depan untuk membangun ekosistem tersebut. Orientasinya bukan menghukum, memermalukan, atau mengambil alih otoritas Guru Nabe dan sistem kependitaan yang hidup dalam masyarakat. Orientasinya adalah menjaga kesucian, meningkatkan kualitas, memberikan perlindungan, dan memulihkan kehormatan Wiku.

Sebab, kehormatan seorang Wiku tidak hanya menjadi milik pribadi sang Wiku. Kehormatan Wiku adalah kehormatan institusi kependitaan, dan kehormatan institusi kependitaan adalah bagian dari kehormatan umat Hindu. Ketika Wiku teguh sebagai Sang Apta, umat memperoleh kepercayaan. Ketika Wiku kukuh sebagai Satyawadi, umat memperoleh tuntunan kebenaran. Ketika Wiku menjadi Patirtan Jagad, kehidupan memperoleh penyucian. Dan ketika Wiku hadir sebagai Panadahan Upadesa, umat memperoleh arah dalam menghadapi perubahan zaman.

Dengan Wiku yang teguh dalam sesana, luas dalam pengetahuan, dalam dalam kebijaksanaan, dan dekat dengan persoalan umat, kependitaan akan kembali menjadi sumber cahaya dari nilai-nilai luhur ajaran Dharma.

99

Penataan kepinanditaan tidak cukup berhenti pada persoalan administrasi atau pemberian legitimasi formal. Ada hal yang jauh lebih mendasar adalah bagaimana membangun sistem kepinanditaan yang berlandaskan sastra, dresta, kedewaguruan, sesana, kompetensi, dan kesejahteraan.

08

**MENATA KEMBALI
KEPINANDITAAN:
AGURON-GURON,
SESANA, DAN
PERLINDUNGAN
PEMANGKU**

MENATA KEMBALI KEPINANDITAAN: AGURON-GURON, SESANA, DAN PERLINDUNGAN PEMANGKU

Pinandita atau Pemangku memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan umat Hindu. Mereka berada paling dekat dengan umat, ngayah di pura, memimpin pelaksanaan upacara sesuai kewenangannya, sekaligus menjadi sosok yang sehari-hari menjaga keberlangsungan tradisi keagamaan di tengah masyarakat.

Karena kedudukannya yang penting tersebut, penataan kepinanditaan tidak cukup berhenti pada persoalan administrasi atau pemberian legitimasi formal. Yang jauh lebih mendasar adalah bagaimana membangun sistem kepinanditaan yang berlandaskan sastra, dresta, kedewaguruan, sesana, kompetensi, dan kesejahteraan.

Ada beberapa hal yang menurut saya perlu mendapat perhatian.

Pertama, memperjelas definisi dan kedudukan Pinandita

Kita perlu memiliki pemahaman yang lebih jelas mengenai siapa yang disebut Pinandita atau Pemangku.

Dalam praktiknya terdapat kerancuan antara proses inisiasi Ekajati sebagai proses penyucian diri secara pribadi dengan proses pengangkatan seseorang sebagai Pemangku karena mendapatkan kepercayaan dan mandat dari komunitas umat untuk menjalankan swadharma pada suatu pura. Keduanya tidak selalu identik.

Seseorang dapat menjalani proses penyucian pribadi, tetapi pengangkatan sebagai Pemangku pada Kahyangan Desa, Dang Kahyangan, Kahyangan Jagat, maupun pura lainnya mempunyai dimensi kelembagaan dan komunal. Ada umat, pengempon pura, tradisi, serta dresta yang harus dihormati.

Karena itu, perlu dirumuskan secara lebih terang hubungan antara Ekajati, Pinandita, Pemangku, proses pewintenan atau inisiasi, dan mandat komunitas. Kejelasan ini penting agar tidak muncul praktik bahwa seseorang secara sepihak merasa memiliki kewenangan kepamangkuan hanya karena telah menjalani suatu proses penyucian tertentu.

Kedua, menguatkan kembali sistem Aguron-guron dan Kedewaguruan

Menjadi Pemangku bukanlah akhir dari proses belajar. Justru sejak seseorang menerima tanggung jawab kepamangkuan, proses belajar dan penyucian diri berlangsung terus-menerus.

Karena itu, sistem Aguron-guron atau Kedewaguruan harus diperkuat kembali.

Seorang Pemangku semestinya mempunyai Guru atau Pandita yang jelas, demikian pula panugrahan dan tuntunan yang diterimanya. Hubungan Guru dan siswa tidak berhenti pada saat upacara inisiasi, melainkan menjadi proses pembelajaran, pembinaan, dan pengawasan yang berkelanjutan.

Kedewaguruan juga tidak boleh berkembang tanpa batas sehingga mengabaikan tatanan yang hidup di masyarakat. Pelaksanaan kepamangkuan harus tetap nganutin sastra miwah dresta.

Hal ini terutama sangat penting bagi Pemangku yang ngayah pada Kahyangan Jagat, Dang Kahyangan, dan Kahyangan Desa. Sistem Kedewaguruan harus menghormati Catur Dresta serta tatanan keagamaan yang telah tumbuh dan diwariskan oleh masyarakat.

Dengan demikian, Guru memberikan tuntunan spiritual, sementara Pemangku tetap berpijak pada sastra dan dresta tempat ia menjalankan swadharmanya.

Ketiga, menyusun pedoman materi Aguron-guron.

Materi Aguron-guron juga memerlukan pedoman yang lebih sistematis agar terdapat kesatuan dalam hal-hal mendasar tanpa mematikan kekayaan tradisi Hindu Nusantara.

Dalam hal ini, Sabha Pandita memiliki posisi penting untuk membangun kesatuan tafsir dan memberikan tuntunan mengenai materi pokok yang semestinya dipahami seorang Pemangku.

Materinya sekurang-kurangnya mencakup tiga kerangka dasar: Tattwa, Susila, dan Upacara, disertai pemahaman mendalam mengenai Sesana Kepamangkuan.

Namun, kesatuan pedoman tidak boleh berubah menjadi penyeragaman dresta. Justru seorang Pemangku harus dididik untuk mengenali, memahami, menghormati, dan menjalankan kearifan lokal serta Catur Dresta yang hidup dalam komunitas tempatnya ngayah.

Kita membutuhkan kesatuan pada prinsip-prinsip dasar keagamaan, tetapi tetap memberikan ruang bagi kebhinnekaan praktik keagamaan Hindu Nusantara.

Keempat, mempertegas Sesana Kepamangkuan.

Kepamangkuan bukan semata-mata kewenangan untuk menjalankan upacara. Di dalamnya terdapat sesana, yaitu disiplin etik, spiritual, dan sosial yang harus dijaga.

Karena itu, Sesana Kepamangkuan perlu dirumuskan secara lebih jelas dan dapat menjadi pedoman bersama. Apa yang patut dan tidak patut dilakukan seorang Pemangku? Bagaimana menjaga kesucian diri? Bagaimana hubungan dengan Guru, sesama Pemangku, Pandita, pengempon pura, dan umat? Apa batas kewenangan kepamangkuan? Bagaimana menjaga perilaku di ruang publik dan kehidupan sosial?

Semua itu memerlukan tuntunan yang terang.

Prinsip dasarnya tetap: nganutin sastra miwah dresta. Sastra memberikan dasar dan tuntunan keagamaan, sedangkan dresta memastikan bahwa pelaksanaannya tetap menghormati ruang sosial, sejarah, dan tradisi tempat Dharma itu hidup.

Kelima, menjaga kesejahteraan para Pemangku.

Kita sering berbicara tentang kewajiban Pemangku untuk ngayah, tetapi jauh lebih jarang berbicara tentang kewajiban umat untuk menjaga mereka yang ngayah.

Padahal, Pemangku juga mempunyai keluarga dan kebutuhan hidup. Mereka membutuhkan pelayanan kesehatan, perlindungan ketika mengalami kecelakaan atau tidak mampu bekerja, serta kepastian dasar bagi kehidupan keluarganya.

Karena itu, sudah saatnya PHDI bersama pengempon pura dan umat membangun sistem perlindungan sosial bagi para Pemangku.

Setidaknya terdapat tiga instrumen yang dapat dikembangkan: BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta sistem punia rutin dari umat atau pengempon pura.

Punia kepada Pemangku jangan dipahami sebagai transaksi atas pelayanan keagamaan. Punia merupakan bentuk tanggung jawab dan rasa terima kasih umat kepada mereka yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, pikiran, dan hidupnya untuk ngayah. Jangan sampai kita menuntut Pemangku menjaga kesucian pura dan melayani umat, sementara kualitas hidup dan perlindungan sosial mereka sendiri kita abaikan.

Keenam, membangun sistem pembinaan, pengawasan, dan sanksi.

Kedudukan spiritual harus berjalan beriringan dengan pertanggungjawaban. Karena itu, sistem kepinanditaan juga membutuhkan mekanisme pembinaan dan pengawasan yang jelas. Dalam sistem Aguron-guron, seorang Pemangku berada dalam pembinaan Gurunya. Pada saat yang sama, karena sebagian Pemangku menerima mandat dari komunitas, maka pengempon pura atau komunitas yang mengangkatnya juga mempunyai ruang untuk melakukan pengawasan sesuai kewenangannya.

Mekanisme ini harus diatur secara hati-hati agar tidak berubah menjadi intervensi terhadap urusan spiritual, tetapi juga tidak membiarkan pelanggaran sesana tanpa pertanggungjawaban.

Perlu ada kategori pelanggaran dan tingkatan sanksi yang jelas, mulai dari teguran, pembinaan, pembatasan sementara pelaksanaan swadharma, sampai pada pelepasan atribut atau status kepamangkuan untuk pelanggaran berat, melalui mekanisme yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, sistem pengawasan tidak semata-mata bersifat menghukum. Tujuan utamanya adalah menjaga kesucian kepamangkuan, melindungi umat, sekaligus menjaga kehormatan Pemangku itu sendiri.

Pada akhirnya, penataan kepinanditaan harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih besar: bagaimana kita menjaga kesucian sekaligus memuliakan pengabdian.

Pemangku bukan sekadar pelaksana upacara. Mereka adalah pelayan umat, penjaga pura, penerus pengetahuan keagamaan, sekaligus penjaga keberlangsungan dresta di tengah masyarakat.

Karena itu, sistem kepinanditaan yang baik harus berdiri di atas beberapa pilar yang saling menguatkan: kejelasan status dan kewenangan, Aguron-guron/Kedewaguruan yang kuat, penguasaan Tattwa-Susila-Upacara, penghormatan terhadap Catur Dresta, Sesana Kepamangkuan yang tegas, perlindungan kesejahteraan, serta pembinaan dan pengawasan yang berkeadilan.

Di sinilah PHDI, khususnya Sabha Pandita bersama seluruh unsur Parisadha, mempunyai tanggung jawab penting. Yang diperlukan bukan menyeragamkan seluruh praktik Hindu yang memang kaya dan beragam, melainkan membangun tuntunan bersama yang menjaga tattwa, menghormati dresta, menegakkan sesana, serta melindungi mereka yang menjalankan swadharma kepamangkuan.

Sebab menjaga marwah agama tidak cukup hanya dengan menjaga kesucian pura. Kita juga harus menjaga pengetahuan, sesana, dan kesejahteraan orang-orang yang dengan tulus mengabdikan hidupnya untuk merawat kesucian itu.

99

Semangat "*Taki-takining sewaka guna widya*" harus kita hidupkan kembali sebagai spirit pembangunan generasi Hindu Nusantara bersungguh-sungguh mencari pengetahuan, mengembangkan kemampuan, dan menggunakan ilmu bagi kemanfaatan kehidupan.

09

**REFOCUSING SISTEM
PENDIDIKAN HINDU
NUSANTARA: PILAR
UTAMA WUJUDKAN SDM
UNGGUL**

REFOCUSING SISTEM PENDIDIKAN HINDU NUSANTARA: PILAR UTAMA WUJUDKAN SDM UNGGUL

Dalam ajaran Hindu, pendidikan bukan sekadar jalan untuk memperoleh pengetahuan, tetapi merupakan bagian penting dari proses membangun kualitas manusia.

Kakawin Nīṭisāstra memberikan tuntunan yang sangat relevan melalui ungkapan "*Taki-taking sewaka guna widya*"—bersungguh-sungguhlah mengabdikan untuk menuntut ilmu pengetahuan yang berguna dan bermanfaat. Pesan tersebut menegaskan bahwa widya (ilmu pengetahuan) harus dicari dengan kesungguhan, kedisiplinan, dan pengabdian. Pengetahuan tidak berhenti pada kecerdasan intelektual, tetapi harus membentuk karakter, meningkatkan kualitas hidup, dan menghadirkan kemanfaatan bagi sesama.

Karena itu, pendidikan harus ditempatkan sebagai pilar utama pembangunan SDM Hindu Nusantara. Masa depan umat sangat ditentukan oleh kemampuan kita menyiapkan generasi yang memiliki *śradha* yang kuat, pengetahuan yang luas, keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman, sekaligus tetap berakar pada nilai dan kebudayaan Hindu Nusantara.

Dalam konteks inilah Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) perlu menjadikan Strategi Pendidikan Umat Hindu sebagai salah satu agenda utama pemberdayaan umat. Setidaknya terdapat delapan langkah strategis yang perlu diperjuangkan.

Pertama, Memperluas Akses dan Meningkatkan Kualitas Pendidikan

PHDI perlu memperjuangkan agar setiap anak Hindu, di mana pun berada, memperoleh akses terhadap pendidikan yang berkualitas, mulai dari pendidikan prasekolah, pendidikan dasar dan menengah hingga pendidikan tinggi.

Perhatian khusus perlu diberikan kepada kantong-kantong umat Hindu di luar Bali, terutama di wilayah yang akses pendidikannya masih terbatas. Jangan sampai kondisi geografis, ekonomi keluarga, maupun jumlah umat yang kecil menyebabkan anak-anak Hindu kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan terbaik.

Dalam kerangka ini, perlu dikembangkan sistem beasiswa dan dukungan pendidikan yang lebih terstruktur melalui kolaborasi pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, filantropi, dan kekuatan ekonomi umat.

Kedua, Memperkuat Tata Kelola Lembaga Pendidikan Hindu

Kita memiliki berbagai lembaga/ perguruan pendidikan yang bernaafaskan Hindu, baik negeri maupun swasta. Tantangan berikutnya adalah memastikan lembaga-lembaga tersebut tumbuh menjadi institusi pendidikan yang unggul, profesional, modern, sekaligus berakar kuat pada nilai dan kebudayaan Hindu Nusantara.

PHDI perlu mendorong peningkatan tata kelola, kualitas sumber daya manusia, kurikulum, riset, infrastruktur, jaringan kerja sama, dan akreditasi lembaga pendidikan Hindu. Identitas Hindu tidak boleh menjadi alasan untuk merasa cukup dengan standar minimum. Sebaliknya, nilai Hindu harus menjadi energi untuk membangun lembaga pendidikan yang unggul dan kompetitif.

Ketiga, Memperjuangkan Ketersediaan Guru dan Penyuluh Agama Hindu

Persoalan yang masih dirasakan di berbagai daerah adalah keterbatasan guru agama Hindu dan penyuluh agama Hindu. Akibatnya, masih terdapat peserta didik Hindu yang tidak memperoleh pelayanan pendidikan agama secara memadai.

Karena itu, PHDI harus secara aktif memperjuangkan formasi dan pengangkatan guru agama Hindu serta penyuluh agama Hindu secara lebih proporsional berdasarkan jumlah, persebaran, dan kebutuhan nyata umat.

PHDI bersama pemerintah juga perlu memiliki basis data yang akurat mengenai jumlah siswa Hindu, sekolah, guru agama, penyuluh, serta daerah yang masih mengalami kekurangan pelayanan. Kebijakan pendidikan umat harus dibangun berdasarkan data, bukan sekadar perkiraan.

Keempat, Memperkuat Perguruan Tinggi Hindu di Luar Bali

Pengembangan pendidikan tinggi Hindu tidak boleh terkonsentrasi hanya di Bali. Kehadiran perguruan tinggi Hindu yang kuat di berbagai wilayah merupakan bagian penting dari pembangunan ekosistem Hindu Nusantara.

Karena itu, perlu diperjuangkan penegerian perguruan tinggi Hindu yang memenuhi persyaratan, terutama di luar Bali. Pada saat yang sama, peningkatan status kelembagaan dari Sekolah Tinggi menjadi Institut dan dari Institut menjadi Universitas perlu terus didorong berdasarkan kesiapan akademik dan kapasitas kelembagaannya.

Peningkatan status jangan sekadar menjadi perubahan nomenklatur. Transformasi kelembagaan harus diikuti peningkatan kualitas dosen, program studi, penelitian, publikasi, fasilitas pendidikan, jejaring nasional-internasional, dan kontribusi nyata kepada masyarakat.

Kelima, Mengembangkan Widyalaya sebagai Basis Pendidikan Hindu

Salah satu peluang strategis adalah memperkuat dan memperluas Widyalaya sebagai lembaga pendidikan dasar dan menengah bercirikan keagamaan Hindu yang dapat memperoleh dukungan pembiayaan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Widyalyaya harus dikembangkan bukan sekadar sebagai sekolah tempat anak-anak Hindu belajar agama, melainkan menjadi pusat pembentukan manusia Hindu yang unggul. Di dalamnya, ilmu pengetahuan modern harus berjalan bersama pendidikan karakter, *sradha*-bhakti, etika, disiplin, kepemimpinan, kepedulian sosial, serta pengenalan terhadap seni, sastra, bahasa, tradisi, dan kebudayaan Hindu Nusantara. Dengan demikian, kita dapat membangun generasi Hindu yang cerdas tanpa kehilangan akar, modern tanpa tercerabut dari kebudayaan, dan religius sekaligus terbuka terhadap perkembangan dunia.

Keenam, Membangun Ekosistem Pendidikan Hindu yang Terintegrasi

Pendidikan Hindu tidak seharusnya berjalan sendiri-sendiri. Kita perlu membangun ekosistem pendidikan yang menghubungkan Widyalyaya, pendidikan tinggi Hindu, asrama, pusat kebudayaan, dan Balai Latihan Kerja.

Model pendidikan berasrama dapat menjadi ruang penting untuk memperkuat pembentukan karakter sekaligus pengembangan seni budaya. Sementara itu, keberadaan Balai Latihan Kerja dapat memberikan keterampilan praktis dan vokasional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ekonomi baru.

Dengan pendekatan tersebut, pendidikan Hindu tidak hanya menghasilkan lulusan yang memahami agama, tetapi juga manusia yang memiliki kompetensi, keterampilan, kreativitas, dan kemandirian ekonomi.

Ketujuh, Membangun Kolaborasi Riset Hindu Nusantara

Perguruan tinggi Hindu perlu membangun jejaring penelitian bersama untuk melakukan dokumentasi, kajian, dan pengembangan

pengetahuan mengenai nilai, *dresta*, tradisi, manuskrip, praktik keagamaan, seni, bahasa, serta berbagai kekayaan Hindu Nusantara.

Hal ini penting karena Hindu Nusantara hidup dalam keragaman. Bali, Jawa, Tengger, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, Sumatra, Maluku dan berbagai wilayah lainnya memiliki kekayaan tradisi yang perlu didokumentasikan dan dikaji secara ilmiah.

Hasil penelitian tersebut tidak boleh berhenti menjadi laporan akademik atau publikasi ilmiah. Pengetahuan yang dihasilkan perlu diterjemahkan menjadi bahan ajar dan sumber pembelajaran bagi siswa Widyalyaya, mahasiswa, guru, penyuluh, serta masyarakat. Dengan demikian, pendidikan agama Hindu benar-benar tumbuh dari realitas dan kekayaan Hindu Nusantara.

Kedelapan, Mengintegrasikan Pendidikan dengan Pemberdayaan Umat

Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat, harus diarahkan secara lebih sistematis untuk menjangkau kantong-kantong umat Hindu di berbagai pelosok Nusantara.

Perguruan tinggi dapat mengirim dosen dan mahasiswa untuk mendampingi masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknologi digital, UMKM, koperasi, pertanian, pariwisata, lingkungan hidup, penguatan desa, dokumentasi budaya, hingga peningkatan kapasitas organisasi keumatan.

Dengan demikian, kampus Hindu tidak menjadi menara gading, tetapi hadir sebagai pusat pengetahuan yang bekerja bersama umat menyelesaikan persoalan nyata kehidupan.

Dari Widya Menuju Umat Berdaya

Delapan agenda tersebut harus ditempatkan dalam satu desain besar pembangunan SDM Hindu Nusantara. PHDI tidak harus mengambil alih tugas pemerintah atau mengelola seluruh lembaga pendidikan. Peran strategis PHDI adalah menjadi pengarah, penghubung, penggerak, dan pejuang kepentingan pendidikan umat. PHDI harus mampu mempertemukan pemerintah, perguruan tinggi, Widyalyaya, yayasan pendidikan, guru, penyuluh, dunia usaha, diaspora Hindu, organisasi kemasyarakatan, dan kekuatan filantropi umat dalam satu ekosistem pendidikan Hindu Nusantara.

Investasi terbesar umat bukan hanya pembangunan fisik, melainkan pembangunan manusia. Pura yang kokoh penting, organisasi yang kuat penting, ekonomi umat yang maju juga penting. Namun semuanya membutuhkan manusia yang berpengetahuan, berkarakter, memiliki keterampilan, dan teguh dalam *sradha*.

Karena itu, semangat "*Taki-takining sewaka guna widya*" harus kita hidupkan kembali sebagai spirit pembangunan generasi Hindu Nusantara bersungguh-sungguh mencari pengetahuan, mengembangkan kemampuan, dan menggunakan ilmu bagi kemanfaatan kehidupan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pendidikan Hindu bukan sekadar berapa banyak sekolah atau perguruan tinggi yang kita miliki, melainkan berapa banyak manusia Hindu yang berhasil kita lahirkan menjadi insan berilmu, berkarakter, berdaya, berbudaya, serta mampu memberikan manfaat bagi umat, bangsa, dan kemanusiaan.

Pendidikan adalah investasi nilai-nilai luhur ajaran Dharma untuk masa depan. Dari Widya kita membangun manusia; dari manusia yang berkualitas kita membangun umat Hindu Nusantara yang kuat dan berdaya.

99

Pemberdayaan perempuan bukan sekadar agenda perempuan. Ia merupakan agenda bersama umat Hindu. Memperkuat perempuan berarti memperkuat keluarga, memperkuat generasi masa depan, dan pada akhirnya memperkuat Hindu Nusantara.

10

**PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN: SAYAP
TANGGUH HINDU
NUSANTARA**

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN: SAYAP TANGGUH HINDU NUSANTARA

Dalam ajaran Hindu, perempuan menempati posisi yang penting dan mulia. Perempuan bukan sekadar bagian dari kehidupan keluarga, tetapi merupakan salah satu kekuatan utama yang menentukan keberlanjutan umat dan peradaban. Dari rahim perempuan lahir generasi pelanjut yang akan membawa nilai, pengetahuan, tradisi, dan nilai-nilai ajaran Dharma ke masa depan.

Perempuan dapat diibaratkan sebagai Pertiwi, bumi yang menjadi tempat kehidupan bertumbuh. Pertiwi mengandung, melahirkan, memelihara, memberi pengayoman, sekaligus menyediakan sumber-sumber kemakmuran bagi kehidupan. Karena itu, penghormatan terhadap perempuan sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari penghormatan terhadap kehidupan itu sendiri.

Namun, menempatkan perempuan sebagai ibu tidak berarti membatasi perannya hanya dalam ranah domestik. Justru karena perempuan memiliki posisi strategis dalam keluarga, umat, dan masyarakat, maka perempuan harus memperoleh ruang yang luas untuk mengembangkan seluruh potensinya.

Dari Data Ditjen Dukcapil Semester I tahun 2026, dari 290,1 juta penduduk Indonesia, 143,7 juta diantaranya adalah Perempuan. Data ini memperlihatkan bahwa jumlah penduduk Perempuan, hampir menyamai penduduk laki-laki yang sebesar 146, 4 juta. Ini angka yang menunjukkan bahwa Perempuan menjadi kekuatan yang menentukan masa depan umat, bangsa dan negara.

Dalam konteks Hindu Nusantara, perempuan juga dapat diibaratkan sebagai salah satu sayap burung Garuda. Seekor Garuda tidak mungkin terbang tinggi hanya dengan satu sayap. Kepakannya akan kuat, seimbang, dan mampu membawanya terbang jauh apabila kedua sayap bergerak bersama. Demikian pula kehidupan umat Hindu. Kemajuan tidak mungkin hanya ditopang oleh laki-laki. Laki-laki dan perempuan adalah dua sayap yang harus sama-sama kuat.

Karena itu, pemberdayaan perempuan bukan sekadar agenda perempuan. Ia merupakan agenda bersama umat Hindu. Memperkuat perempuan berarti memperkuat keluarga, memperkuat generasi masa depan, dan pada akhirnya memperkuat Hindu Nusantara.

Kesetaraan Kesempatan: Pendidikan dan Kesehatan

Strategi pertama adalah memastikan kesetaraan kesempatan bagi perempuan untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.

Pendidikan merupakan pintu utama pemberdayaan. Perempuan Hindu harus memperoleh kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin, mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, kepemimpinan, serta kemampuan menghadapi perubahan zaman. Tidak boleh ada perempuan Hindu yang kehilangan kesempatan mengembangkan potensinya karena keterbatasan ekonomi, geografis, maupun konstruksi sosial yang menghambat.

Perhatian yang sama pentingnya harus diberikan pada kesehatan perempuan, terutama kesehatan reproduksi. Kesehatan ibu sejak sebelum kehamilan, selama kehamilan, persalinan, hingga pengasuhan anak sangat menentukan kualitas generasi berikutnya.

Dengan demikian, pelayanan pendidikan dan kesehatan perempuan sesungguhnya merupakan investasi jangka panjang untuk membangun generasi Hindu Nusantara yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

Memperkuat WHDI sebagai Pilar Pemberdayaan

Strategi kedua adalah mendukung dan memperkuat Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) sebagai organisasi yang meningkatkan kualitas sumber daya serta memperluas peran perempuan Hindu dalam keluarga, kehidupan umat, dan masyarakat.

WHDI perlu semakin diperkuat sebagai ruang pengembangan kapasitas perempuan Hindu. Program-programnya harus

menyentuh kebutuhan nyata perempuan: pendidikan dan literasi, kepemimpinan, keterampilan digital, penguatan ekonomi keluarga, kewirausahaan, kesehatan, pengasuhan anak, hingga peningkatan pemahaman keagamaan.

WHDI juga perlu menjadi ruang lahirnya kader-kader perempuan Hindu yang memiliki kemampuan kepemimpinan. Perempuan harus semakin banyak terlibat dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan keluarga, organisasi keumatan, lembaga sosial, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, maupun ruang publik lainnya.

Dengan cara itulah pemberdayaan tidak berhenti pada slogan tentang pentingnya perempuan, tetapi diwujudkan melalui kesempatan, kapasitas, partisipasi, dan kepemimpinan nyata.

Membangun Perempuan Hindu yang Tangguh

Strategi ketiga adalah membangun ketahanan mental, fisik, spiritual, dan kesejahteraan perempuan Hindu. Perempuan Hindu menghadapi tantangan kehidupan yang semakin kompleks. Selain menjalankan berbagai peran dalam keluarga, banyak perempuan juga bekerja, berorganisasi, menjalankan usaha, berkarya dalam dunia profesional, dan mengambil tanggung jawab sosial di masyarakat.

Karena itu, perempuan Hindu harus memiliki ketangguhan multidimensional: sehat secara fisik, kuat secara mental, mandiri secara ekonomi, sekaligus kokoh secara spiritual. Penguatan *Sradha* dan *Bhakti* menjadi penting agar kemajuan pendidikan, ekonomi, dan profesionalitas tetap memiliki landasan nilai-nilai ajaran Dharma. Spiritualitas bukan penghalang bagi perempuan untuk maju. Sebaliknya, nilai-nilai ajaran Dharma dapat menjadi sumber kekuatan moral untuk menghadapi tekanan dan perubahan kehidupan modern.

Pada saat yang sama, pemberdayaan ekonomi harus mendapatkan perhatian serius. Perempuan perlu memperoleh akses terhadap pelatihan keterampilan, jaringan usaha, teknologi digital, permodalan, koperasi, serta pengembangan UMKM. Ketahanan ekonomi perempuan akan memperkuat ketahanan keluarga dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan umat.

Perempuan sebagai Penjaga Kebudayaan Nusantara

Strategi keempat adalah melibatkan perempuan secara aktif dalam merawat nilai-nilai luhur tradisi, adat istiadat, dan kebudayaan Nusantara. Dalam sejarah kehidupan masyarakat Hindu Nusantara, perempuan memainkan peran besar dalam pewarisan kebudayaan. Melalui keluarga dan komunitas, perempuan ikut menjaga bahasa, sastra, seni, ritual, pengetahuan kuliner, busana, kerajinan, nilai kesusilaan, serta berbagai bentuk kearifan lokal.

Namun perempuan jangan hanya diposisikan sebagai pelaksana tradisi. Mereka harus menjadi subjek yang ikut memahami, memaknai, mengembangkan, dan menentukan masa depan tradisi.

Hal ini penting karena kebudayaan tidak cukup hanya diwariskan. Kebudayaan harus terus dihidupkan dan dikontekstualisasikan agar tetap relevan bagi generasi baru. Perempuan, terutama generasi muda Hindu, perlu diberikan ruang untuk menghadirkan tradisi dalam bentuk-bentuk baru melalui pendidikan, seni, industri kreatif, kewirausahaan budaya, hingga media digital. Dengan demikian, perempuan menjadi jembatan yang menghubungkan warisan masa lalu, kehidupan hari ini, dan masa depan Hindu Nusantara.

Dua Sayap, Satu Kepakan

Pemberdayaan perempuan pada akhirnya bukanlah upaya mempertentangkan perempuan dengan laki-laki. Spirit Hindu justru mengajarkan keseimbangan, keharmonisan, dan saling melengkapi.

Karena itu, kita membutuhkan paradigma kemitraan. Laki-laki dan perempuan harus tumbuh bersama, saling menghormati, saling menguatkan, serta memperoleh kesempatan yang setara untuk menjalankan swadharma dan mengembangkan potensi terbaiknya.

Hindu Nusantara membutuhkan dua sayap yang sama-sama tangguh. Sayap laki-laki dan sayap perempuan. Jika salah satunya lemah, Garuda akan sulit terbang tinggi. Tetapi ketika keduanya kuat dan mengepak bersama, Garuda mampu menjelajah cakrawala.

Demikian pula masa depan umat Hindu. Dengan perempuan yang sehat, terdidik, berdaya secara ekonomi, kuat Sradha dan Bhaktinya, memiliki ruang kepemimpinan, serta menjadi penjaga sekaligus penggerak kebudayaan Nusantara, umat Hindu akan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar untuk menghadapi perubahan zaman.

Perempuan adalah Pertiwi yang menumbuhkan kehidupan. Perempuan adalah ibu yang melahirkan masa depan. Dan perempuan adalah sayap tangguh yang bersama laki-laki membawa Garuda Hindu Nusantara terbang semakin tinggi.

Tentang Penulis



ANAK AGUNG GDE NGURAH ARI DWIPAYANA lahir dari keluarga pewaris Puri Kauhan Ubud, pada tanggal 24 Februari 1972. Ari Dwipayana mendapat gelar doktor Ilmu Politik UGM pada 2013. Gelar tersebut didapat setelah sebelumnya memperoleh gelar Master Ilmu Politik di Program S2 Ilmu Politik UGM tahun 2003 dan menyelesaikan studi S1 di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM tahun 1995.

Sejak tahun 1997 sampai saat ini, Gung Ari bekerja menjadi dosen di Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM, Program Magister dan Doktor Ilmu Politik FISIPOL UGM. Mulai Januari 2026, Gung Ari dipercaya menjadi Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM yang merangkap menjadi Ketua Program Studi Doktor Ilmu Politik UGM.

Untuk pengabdian di luar kampus, pada Januari 2003, Gung Ari mendirikan Yayasan Uluangkep—sebuah NGO yang bergerak dalam penelitian dan pemberdayaan desa adat di Bali. Sejak 2019, bersama Yayasan Puri Kauhan Ubud menggelar festival tahunan *Sastra Saraswati Sewana* sebagai bentuk merawat, melestarikan, dan memajukan warisan budaya dan pengetahuan Bali dalam konteks masa kini. Sampai saat ini, Yayasan Puri Kauhan Ubud secara konsisten menggelar *Sastra Saraswati Sewana*, yang pada tahun 2026 mengambil tema: *Cakrawala Mandala Dwipantara*.

Sejak 2014 hingga 2024 Gung Ari aktif di pemerintahan menjadi Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (2014-2015), Staf Khusus Presiden (2015-2019), dan Koordinator Staf Khusus Presiden (2019-2024). Selain itu juga menjadi Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada, selama dua periode, dari 2014 hingga 2024.

Gung Ari juga juga mendedikasikan dirinya di dunia pemikiran. Jejaknya bisa ditemukan dalam karya-karya-nya, dalam bentuk buku, makalah, artikel sampai dengan status di Instagram, Facebook dan podcast untuk mengikuti era kekinian. Pemikirannya berwarna dalam berbagai spektrum; mulai dari tema politik, sosial sampai dengan budaya. Buku pertama yang pernah dipublikasi adalah *"Kelas dan Kasta: Pergulatan Kelas Menengah di Bali"*, diterbitkan pada tahun 2001. Pada bulan April 2004, terbit bukunya yang kedua *"Bangsawan dan Kuasa: Kembalinya Para Ningrat di Dua Kota"*. Pada tahun 2005, terbit bukunya yang ketiga, *"GLOBALISM": Pergulatan Politik Representasi atas Bali"*.

Selain itu, Gung Ari juga menginisiasi sejumlah buku yang diterbitkan oleh Yayasan Puri Kauhan Ubud antara lain: *"Brahmasara Bhawana Mukti: Teknologi untuk Kemajuan Peradaban"*, (2025). *"Niti Raja Sasana: Tongkat Sastra Kepemimpinan Negeri"* (2024), *"Toya Uriping Bhuwana Usadhaning Sangaskara: Air Sumber Kehidupan, Penyembuh Peradaban"* (2023), *"Usadha Siddhi"* (2023), *"Wariga Siddhi"* (2023), *"Jaladhi Smreti: Menelusuri Pelabuhan Kuno di Ketewel dalam Ingatan Masyarakat dan Catatan Kolonial"* (2023), *"Nyapuh Tirah Campuhan: Jejak Peninggalan Masa Lalu di DAS Oos"* (2023), *"Mai Mabasa Bali: Kartun Strip Terpilih 2021"* (2021), *"Sastra Saraswati Sewana: Pamarisuddha Gering Agung: Karya-karya Terpilih"* (2021), *"Mulat Sarira untuk Bali Bangkit : Pabligbagan di Masa Pandemi"* (2021), *"Niskamakarma"* (2026), *"Tandur Taru Urip, Mengakar Kuat, Menjulung Tinggi"* (2026).

\Atas pengabdian pada Bangsa dan Negara, Gung Ari mendapatkan anugerah Bintang Jasa Utama dari Presiden RI, Agustus 2023 dan Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia dari DPP LVRI pada tahun 2024. Di bidang Kebudayaan, Gung Ari memperoleh Parama Bhakti Budaya dari Gubernur Bali pada tahun 2024.



Puri Kauhan Ubud

ပုရိကပူဟန်ဥပုသ်

www.purikauhanubud.org

email

info@purikauhanubud.org

facebook

Yayasan Puri Kauhan Ubud

youtube

Puri Kauhan Ubud TV

IG

[purikauhanubud](https://www.instagram.com/purikauhanubud)